

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN  
DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**NURUL GUSMIRANDA RAJAGUKGUK**  
**NIM 51143030**

Program Studi  
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2019**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN  
DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Disusun Oleh:

**NURUL GUSMIRANDA RAJAGUKGUK**  
**NIM 51143030**

Program Studi  
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019M/1440 H**

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL GUSMIRANDA RAJA GUK GUK

NIM : 51.14.3.030

Judul Skripsi : “PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 21 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



**Nurul Gusmiranda Raja Guk Guk**

NIM 51.14.3.030

**PERSETUJUAN**

**Skripsi berjudul:**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN  
DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA**

**Oleh**

**NURUL GUSMIRANDA RAJA GUK GUK**

**NIM: 51.14.3.030**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 19 Desember 2018

**Pembimbing I**



**Dr. Sugianto, MA**

**NIP. 19670607 200003 1 003**

**Pembimbing II**

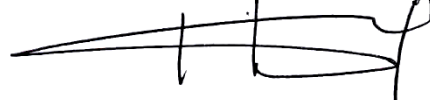


**Kamilah, SE, AK, M.Si**

**NIP. 19791023 200801 2 014**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**



**Hendra Harmain, M.Pd**

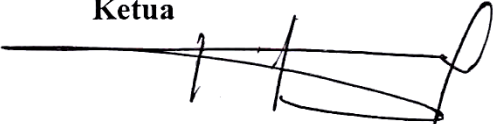
**NIP. 19730510 199803 1 003**


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara". Atas nama Nurul Gusmiranda Raja Guk Guk, NIM 51143030 program studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 11 Februari 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada program studi Akuntansi Syariah.


Medan, 19 Juni 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Program Studi Akuntansi Syariah  
UIN-SU  
Sekretaris


Ketua

  
(Hendra Harmain, M.Pd.)  
NIP. 19730510 199803 1 003

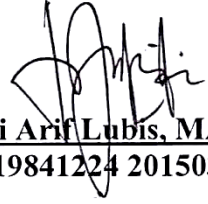
  
(Kusmilawaty, SE, AK, M.AK)  
NIP. 19800614 201503 2 001

Anggota


  
1. (Dr. Sugianto, MA)  
NIP. 19670607 200003 1 003

  
2. (Kamilah, SE, AK, M.SI)  
NIP. 19791023 200801 2 014

  
3. (Dr. Andri Soemitra, MA)  
NIP. 19760507 200604 1 002

  
4. (Fauzi Arif Lubis, MA)  
NIP. 19841224 201503 1 004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
UIN-SU

  
Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 19760507 200604 1 002

## Abstrak

Nurul Gusmiranda Rajagukguk, NIM 51143030, Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Tata Kelola Keuangan dalam Penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018. Dengan pembimbing satu Bapak Dr. Sugianto, MA dan pembimbing dua Ibu Kamilah, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan dalam penerapan *good governance* pada BPJS ketenagakerjaan cabang Medan Utara. Penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif, menggunakan metode kuantitatif. pengambilan sampelnya menggunakan teknik *nonprobability sampling*, dengan responden meliputi seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS). Kesimpulan penelitian menunjukan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dimana variabel sistem informasi akuntansi memiliki  $t_{hitung} = 9,436$ . dan  $t_{tabel} (\alpha = 0,05; df = 36)$  adalah sebesar 2,032. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $9,436 > 2,032$  atau nilai signifikan yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,48 maka hipotesis diterima, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan.

**Kata kunci:** sistem informasi akuntansi, tata kelola keuangan, *good governance*.

## **Kata Pengantar**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah Rabbil Alamiin*, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan di BPJS Ketenadakerjaan Cabang Medan Utara)” dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang diharapkan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

Skripsi ini disusun untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan penelitian, khususnya bidang Sistem Informasi Akuntansi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap agar karya ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Keluargaku tercinta, terutama kedua orang tuaku, Bapak Agus Suharto Rajagukguk dan Ibu Suhermiyati serta saudara-saudariku, Monica Aprillia Rajagukguk, Tulus Juanda Rajagukguk dan Lucky Sanjaya Rajagukguk atas segala curahan doa, motivasi dan dukungan sehingga penulis sampai pada titik ini.
2. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Kamila, SE, Ak, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Sumatera Utara Medan. Terima kasih atas pembelajaran dan motivasi yang telah diberikan selama ini.

5. Bapak Drs. Sugianto, MA dan Ibu Kamila, SE, Ak, M.Si. selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu penulis dalam menimbah ilmu dan memperluas wawasan selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
7. Segenap Staf Jurusan dan Pegawai Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis melakukan studi dan penyelesaian skripsi.
8. Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara Bapak Asran Pane yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan motivasi serta wejangan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepala bidang keuangan Ibu Dwita yang bersedia meluangkan waktu guna menyempurnakan penelitian ini.
10. Abangda Ahmad Fauzi Tarigan selaku staff bidang umum dan sumber daya yang merelakan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penelitian ini.
11. Seluruh karyawan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara. Terima kasih telah memberikan data, informasi, dan bantuan kepada peneliti selama melakukan penelitian.
12. Sahabat The Best yaitu Linda Apriani, Maimunah Pane, Arfina Nurharli, Nur Azmi dan Misbah Simanjuntak yang menemani, membantu, membimbing dan memotivasi untuk setiap hal dalam aktivitas perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini.
13. Keluarga besar Akuntansi Syariah B (AKS B) yang memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.



14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Perumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Dan Manfaat .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teori.....	6
1. Good Governance.....	6
a. Pengertian Good Governance .....	6
b. Good Governance Dalam Islam .....	7
2. Agency Theory.....	15
3. Stewardship Theory .....	16
4. Akuntansi Pemerintah .....	17
a. Pengertian Akuntansi Pemerintah .....	17
b. Pengertian Akuntansi Menurut Syariah .....	18
c. Prinsip dan Pelaporan Keuangan Pemerintah .....	20
5. Pengelolaan Keuangan .....	24
a. Pengertian Pengelolaan Keuangan .....	24
b. Pengelolaan Keuangan Dalam Islam .....	25
6. Sistem Informasi Akuntansi .....	28
a. Pengertian Sistem.....	28
b. Pengertian Sistem Informasi .....	29

c. Pengertian Sistem Informasi Berbasis Komputer .....	30
d. Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi .....	30
e. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi .....	31
f. Tinjauan Islam Tentang Sistem Informasi Akuntansi .....	32
g. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi .....	33
B. Kajian Terdahulu .....	34
C. Kerangka Pemikiran .....	38
D. Hipotesis .....	38
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	39
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	39
C. Populasi Dan Sampel .....	39
1. Populasi .....	39
2. Sampel .....	40
D. Data Penelitian .....	41
1. Data Primer .....	41
2. Data Sekunder .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
1. Wawancara .....	41
2. Skala .....	42
3. Observasi .....	42
F. Definisi Operasional .....	43
1. Variabel Dependen .....	43
2. Variabel Independen .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	46
1. Analisis Deskriptif .....	46
2. Uji Kualitas Data .....	48
a. Uji Validitas .....	48
b. Uji reliabilitas .....	48
c. Uji Normalitas .....	49
3. Uji Hipotesis .....	49

a. Uji t.....	49
b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	50
c. Uji Regresi Linier Sederhana .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian .....	51
1. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan .....	51
2. Karakteristik Responden .....	53
a. Jenis Kelamin .....	53
b. Usia .....	54
c. Pendidikan.....	54
d. Masa Kerja .....	55
3. Deskripsi Variabel.....	55
a. Variabel Sistem Informasi Akuntansi .....	56
b. Variabel Tata Kelola Keuangan .....	64
4. Hasil Analisis Data.....	71
a. Analisis Deskriptif .....	71
b. Hasil Uji Kualitas Data .....	72
5. Hasil Uji Hipotesis .....	78
a. Uji $R^2$ .....	78
b. Uji t.....	78
c. Uji regresi Linear Sederhana.....	79
B. Pembahasan.....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tiga Pilar <i>Good Governance</i> .....	6
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	38
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan .....	41
Gambar 4.1 Flowchart Keuangan .....	64
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Data .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Jumlah Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cab. Medan Utara.....	40
Tabel 3.2 Indikator Penilaian Variabel .....	44
Tabel 3.3 Klasifikasi Champion Mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi .....	48
Tabel 3.4 Klasifikasi Champion Mengenai Tata Kelola Keuangan.....	48
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	54
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	55
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	55
Table 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	56
Tabel 4.6 Tabel Rentan Skor Kuesioner .....	56
Tabel 4.7 Tanggapan Mengenai Tunjangan Kinerja.....	59
Tabel 4.8 Tanggapan Mengenai Tata Kelola Keuangan .....	68
Tabel 4.9 Uji Variabel Deskriptif Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Tata Kelola Keuangan .....	72
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X). 74	
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Tata Kelola Keuangan (Y) .....	75
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X).....	76
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tata Kelola Keuangan (Y).....	77
Tabel 4.14 Hasil Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	79
Tabel 4.15 Hasil Uji t.....	80
Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Sederhana .....	81

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Good governance* di Indonesia mulai populer sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 – 1998. Krisis tersebut menjadi pelajaran berharga untuk para pelaku bisnis/ekonomi akan pentingnya penerapan *good governance*. OECD dan World Bank mendefinisikan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.<sup>1</sup>

*Governance* tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan pondasi utama bagi terciptanya *good governance* yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya.<sup>2</sup>

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Sistem informasi akuntansi merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan karena sistem informasi akuntansi adalah serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan.<sup>3</sup>

Pada tahun 2014, terdapat temuan BPK terhadap pengalihan aset Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ditemukan beberapa temuan yaitu Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK) tidak maksimal mendukung peningkatan kemajuan

---

<sup>1</sup> Fathurrohman, M. (2012). *Good Governance [Online]*. [Http://Muhfathurrohman.Wordpress.Com/2012/12/22/Good-Governance/Comment-Page-1/](http://Muhfathurrohman.Wordpress.Com/2012/12/22/Good-Governance/Comment-Page-1/), Diakses Pada 24 Mei 2018 Pukul 11.16.

<sup>2</sup> Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Vol.5, Desember 2012, 12-16 Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desi Handayani Program Studi Akuntansi - Politeknik Caltex Riau, H. 15

<sup>3</sup> Dedi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), H. 201

BPJS Ketenagakerjaan terutama dari sisi peningkatan kepersertaan karena dari 150 cabang yang membuka SIJSTK hanya 34 cabang yang mampu mengoperasikan. Kebijakan direksi BPJS Ketenagakerjaan yang akan membeli 3.000 *user* tambahan untuk program SIJSTK. Padahal BPJS baru saja membeli 200 user dengan biaya Rp 20 miliar. Salah satu SIJSTK yang mengalami masalah adalah sistem pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Jika ingin mencairkan dana JHT ke suatu cabang, memakan waktu 3-4 bulan.<sup>4</sup>

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan ditemukan masalah berupa pengelolaan dana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didasari oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengalihan Aset PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset Program dan Aset BPJS Ketenagakerjaan serta Kegiatan Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (JHT), Non JHT, dan Biaya PT Jamsostek Tahun Buku 2012 dan 2013 pada BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Jawa Timur, Medan, Jawa Barat, dan Bali.

Berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan, BPK mencatat sejumlah poin yang dianggap patut menjadi perhatian pihak BPJS, antara lain: (1) Pengelolaan Dana Pengembangan JHT tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 sehingga peserta Jamsostek tidak memperoleh pengembangan Dana JHT tepat waktu dan tepat jumlah sebesar Rp 1.364.438.671.979,- serta berkurang sebesar Rp 25.831.029.556,- belum dapat dijelaskan; (2) Reklasifikasi Liabilitas Dana Non JHT ke Cadangan Umum (Ekuitas) sebesar 1.198.421.605.861,- tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga mengurangi pengalihan Aset PT Jamsostek ke Dana Jaminan Sosial (DJS); (3) PT Jamsostek tidak membagikan hasil investasi ke Dana Pengembangan Non JHT milik peserta Jamsostek dari tahun 2011-2013

---

<sup>4</sup> Siti Arpiah, *Ini Empat Masalah It Di Bpjs Ketenagakerjaan*, <http://Www.Beritasatu.Com/Makro/345549-Ini-Empat-Masalah-It-Di-Bpjs-Ketenagakerjaan.Html>, Diakses Pada 28 Juni 2018, Pukul 10.16

<sup>5</sup> *Bpjs Ketenagakerjaan*, [https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Bpjs\\_Ketenagakerjaan](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Bpjs_Ketenagakerjaan), Diakses Pada 24 Mei 2018 Pukul 11.16



sebesar Rp 594.280.492.271,-; (4) BPJS Ketenagakerjaan kurang membagikan Dana Pengembangan Non JHT ke dalam masing-masing Program DJS sebesar Rp 1.794.835.124.409,-; (5) Pekerjaan TV Program Jamsession I dan II dilaksanakan secara swakelola tidak sesuai dengan ketentuan dan realisasi biaya senilai Rp 7.095.000.000,- belum dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Terhadap temuan di atas BPJS Ketenagakerjaan menerangkan telah menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI hingga selesai, terkait pengelolaan dana dan ketentuan yang harus dijalankan. Melalui surat resmi bernomor 365/S/XX/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, Badan Pemeriksa Keuangan pun telah menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah menindaklanjuti hasil temuan dan dinyatakan selesai.<sup>7</sup>

Meskipun permasalahan di atas telah ditindak lanjuti, permasalahan-permasalahan tersebut kemungkinan besar meninggalkan dampak terhadap penerapan sistem informasi akuntansi dan tata kelola keuangan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Terutama salah satu daerah yang terdapat temuan tersebut adalah Medan, maka penelitian tentang pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan dalam penerapan *good governance* pada BPJS ketenagakerjaan cabang Medan Utara menarik untuk dilakukan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dana dikelola tidak sesuai peraturan berpengaruh terhadap tata kelola keuangan.
2. Penggunaan SIJSTK yang tidak maksimal dari 150 cabang hanya 34 cabang yang dapat mengoperasikan SIJSTK berpengaruh terhadap tata kelola keuangan.

---

<sup>6</sup> Gilang Fauzi, *Bpjs Ketenagakerjaan Bermasalah, Duit Triliunan Menguap*. Cnn Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20160114073347-20-104162/Bpjs-Ketenagakerjaan-Bermasalah-Duit-Triliunan-Menguap>, Diakses Pada 27 Mei 2018 Pukul 11.13.

<sup>7</sup> *Bpjs Ketenagakerjaan Telah Tindak Lanjuti Temuan Bpk*, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/Berita/6041/Bpjs-Ketenagakerjaan-Telah-Tindak-Lanjuti-Temuan-Bpk>, Diakses Pada 21 Oktober 2018 Pukul 19.17.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka masalah penelitian ini dibatasi hanya pada satu variabel terikat, yaitu tata kelola keuangan dan satu variabel bebas, yaitu sistem informasi akuntansi.

### **D. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan dalam penerapan *good governance* di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara?.

### **E. Tujuan Dan Manfaat**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Peneliti**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan BPJS Ketenagakerjaan dalam penerapan *Good Governance*.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan, dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan perusahaan mengenai sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan BPJS Ketenagakerjaan dalam penerapan *good governance*.

### **3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya mengenai sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan BPJS Ketenagakerjaan dalam penerapan *good governance*.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

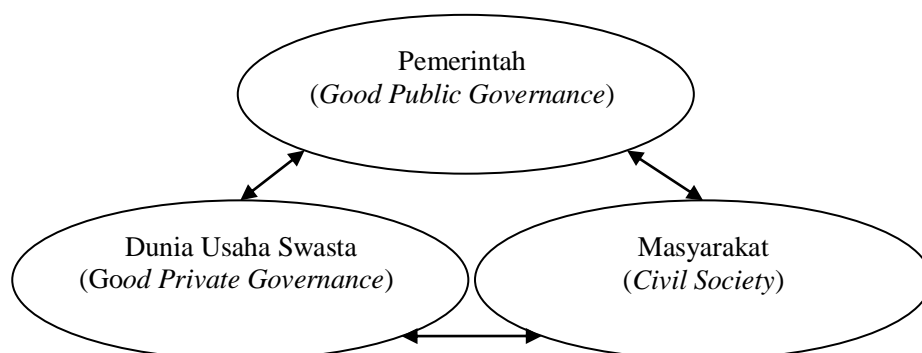
#### A. Landasan Teori

##### 1. *Good Governance*

###### a. Pengertian *Good Governance*

Beberapa pihak telah mengartikan *governance* dalam beberapa perspektif di antaranya UNDP mendefinisikannya sebagai “*the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*” dengan demikian *governance* memiliki tiga pilar yang berkaitan yaitu *economic*, *political*, dan *administrative*. *Economic governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di suatu Negara dan interaksi di antara pelaku ekonomi. *Political governance* berkaitan dengan proses-proses memformulasikan kebijakan. Sedangkan *administrative governance* berkaitan dengan sistem implementasi kebijakan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemahaman *governance* ini maka terdapat tiga domain institusi *governance* yang saling berinteraksi yaitu Negara atau pemerintahan (state); dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Ketiga institusi ini harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip-prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain, Lihat gambar berikut:



**Gambar 2.1 Tiga Pilar *Good Governance***

---

<sup>8</sup> Sedarmayanti, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), H.4

Sementara arti *good* dalam *good governance* mengandung makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Good* mengandung makna pula bahwa terdapat aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dari segi *functional aspect*<sup>9</sup>, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Bank Dunia<sup>10</sup> mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan, sedangkan UNDP sendiri memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara sektor swasta dan masyarakat (*society*).

#### **b. Good Governance Dalam Islam**

Sejarah telah menunjukkan pada kita, bahwa terjadi ketidakharmonisan hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Hal itu terlihat pada abad pertengahan saat gereja mendominasi kehidupan masyarakat Eropa pada saat itu. Dampaknya, perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru mengalami kemandekan meskipun dapat dibuktikan secara rasional dan perhitungan yang tepat. Dalam periode yang sama, di jazirah Arab, ilmu pengetahuan sedang gencar-gencarnya dikembangkan dan penemuan demi

---

<sup>9</sup> Lan Dan Bpkp, 2000, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Cetakan Pertama, H. 5.

<sup>10</sup> Definisi Governance Yang Lebih Rinci Dapat Dilihat Pada Rhoddes, Raw. "Understanding Governance Policy Networks, Governance, Reflexivity And Accountability", Open University Press, (Buckingham: Philadelphia, 1997), H. 15, Yang Menyatakan Bahwa "The Term Governance Refers To A Change In The Meaning Of Government, Referring To A New Process Of Governing Rules Of The Game And Significant Outonomy From The State".

penemuan baru terus dilakukan. Banyak para ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lahir pada zaman itu.<sup>11</sup>

Sebut saja Al Farabi, Al Khawarizmi, Ibnu Sina, dan masih banyak lagi. Agama Islam tak pernah menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Faktanya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadillah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadillah ayat 11).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah dan karena ilmulah derajat manusia dapat terangkat. Bahkan, banyak pernyataan-pernyataan yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an serta perkataan dan perilaku rasul dalam hadis dapat dibuktikan secara ilmiah dengan ilmu pengetahuan modern.<sup>12</sup>

Al-Qur'an diturunkan Allah SWT sebagai kitab suci umat Islam untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Meskipun Al-Qur'an diturunkan 1400 tahun yang lalu, namun isinya masih tetap relevan hingga sekarang. Al-Qur'an bagi umat Islam dianggap sebagai 'rumus canggih' yang di dalamnya terdapat berbagai macam disiplin ilmu yang telah teruji kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern, beberapa di antaranya dalam bidang medis, teknologi, sosial, dan pemerintahan.<sup>13</sup>

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance*. Di dalam Al-Qur'an tidak

---

<sup>11</sup> Abdul Basith Ramadhan, *Good Governance Dalam Islam*, <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/Good-Governance-Dalam-Islam/>

<sup>12</sup> Ibid.,

<sup>13</sup> Ibid.,

dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan *good governance* pada pemerintahan. Sebenarnya, konsep *good governance* yang ada dalam Al-Qur'an tak hanya dapat diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep *accountability*, *transparency*, *justice* dan *equity*.<sup>14</sup>

*Accountability* atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8:

لَهَا يَوْمَئِذٍ مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرُهَا (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرُهَا (٨)

Artinya: (7) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (8) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak. Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya...” (HR al-Bukhari no. 2751 dan HR Muslim No 4828). Dalam kaitannya dengan konsep *good governance*, komitmen seorang pemimpin (dan juga para pemegang amanah di pemerintahan) akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *good governance*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> Prasojo, E., & Kurniawan, T. Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia. Dipresentasikan Dalam The 5th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia. (2008).

Komitmen sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang leader. Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (*good governance*). Tanpa adanya komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari seorang pemimpin, rasanya *good governance* yang diimpi-impikan hanya akan menjadi utopis semata.<sup>16</sup>

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di bidang manajemen keuangan transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Konsep transparansi (*transparency*) dalam ajaran agama Islam, telah disebutkan Allah SWT sejak 1400 tahun yang lalu dalam firman-Nya yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ

---

<sup>16</sup> Abdul Basith Ramadhan, Loc. Cit.



تَكُونِ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah:282).<sup>17</sup>

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif

<sup>17</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Al-Jumanatul 'Ali, (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2004), H. 48

terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.<sup>18</sup> Transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada masyarakat.

Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi dan keterbukaan pemerintah menjadi komponen penting untuk menuju kemajuan suatu negara. Adanya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, akan dapat meminimalisir tingkat korupsi yang menjadi patologi kronis dalam pemerintahan di banyak negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karenanya, isu transparansi pemerintahan ini menjadi isu yang sentral dibicarakan oleh dunia internasional untuk menuju *good governance*.<sup>19</sup>

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hak setiap individu adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, kesamaan derajatnya, kesamaan hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama. Pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang mutlak diperlukan meskipun keadilan pada umumnya relatif sulit untuk dilakukan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial, yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang, sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, telah mengajar konsep keadilan 1400 tahun yang lalu. Dalam ajaran Islam keadilan dapat diartikan secara sempit sebagai menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Hal ini juga mengisyaratkan untuk memperlakukan orang lain dengan perilaku yang tidak membeda-bedakan. Keadilan dalam konsep pemerintahan yang diajarkan oleh

---

<sup>18</sup> (Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2013)

<sup>19</sup> Abdul Basith Ramadhan, Loc. Cit.

agama Islam menjelaskan bahwa pemerintah harus mengkomodasi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hak masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, makanan, kebutuhan sandang, dan papan bagi setiap masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang menjelaskan konsep terkait keadilan terdapat pada surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl; 90).

Ayat di atas termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab alquran, karena di dalam ayat ini digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala perbuatan zalim, dan sifat arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah SWT tidak berbuat zalim kepada siapa pun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dengan menginjak hak orang lain. Selain ayat yang tadi dijelaskan, masih cukup banyak ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berperilaku adil.<sup>20</sup>

Prinsip kesetaraan menjadi prinsip konstitusional terpenting yang menjadi dasar dari sistem suatu negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa prinsip kesetaraan yang ada dalam suatu komunitas harus setara dalam hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang akan dipikul oleh setiap orang tanpa mendiskriminasi orang lain karena perbedaan agama, suku, ras, dan kelompok tertentu. Semua manusia

---

<sup>20</sup> Ibid.,

dipandang sama oleh Allah SWT dan tidak membeda-bedakan maupun orang tersebut kaya, miskin, pintar, bodoh, dan lain-lain.

Satu hal yang menjadi pembeda antara individu satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, tidak ada suatu bangsa yang diciptakan lebih unggul dari bangsa lainnya atau pun tidak ada suatu bangsa yang diciptakan memiliki derajat yang lebih rendah dari pada bangsa lainnya. Nilai manusia ditentukan oleh Allah SWT atas kebaikan yang telah mereka perbuat dan tingkat ketakwaan kepada Allah SWT. Perbedaan yang muncul seperti ras, suku, agama, dan kelompok-kelompok tertentu tidak lain adalah untuk saling melengkapi dalam bingkai kehidupan umat manusia.

Jika konsep ajaran *good governance* dalam ajaran agama Islam diamalkan dan diinternalisasi dalam tata pemerintahan sebaik mungkin, niscaya tidak akan ada patologi sosial seperti korupsi, ketidakadilan sosial, kesenjangan, diskriminasi antargolongan, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang sempurna tidak membatasi pemeluknya untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, bahkan mendorong pemeluknya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Alaq ayat satu sampai dengan lima yang pertama kali diturunkan ke bumi, yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu paling mulia. Yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (manusia tersebut)".

Harapannya dari tulisan ini, dapat membuka pandangan kita sebagai insan akademisi, terlebih kita sebagai umat Islam, untuk mengkaji lebih mendalam konsep pemerintahan yang banyak ditulis oleh para ahli dari sudut pandang agama

Islam. Lalu, kita harus mengubah paradigma berpikir kita tentang ilmu pengetahuan yang ada di Al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan modern. Yang ada selama ini, ilmu pengetahuan yang telah dicetuskan oleh ilmuwan barat, lalu baru ditemukan relevansinya dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Agaknya pola pikir seperti ini perlahan coba diubah. Bacalah Al-Qur'an dan pahami isi dari redaksi ayat tersebut lalu buktikan dengan ilmu pengetahuan modern. Al-Qur'an sebagai buku panduan hidup umat Islam tidak akan “ketinggalan zaman” walaupun diturunkan 1400 tahun yang lalu apalagi bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern.<sup>21</sup>

## 2. *Agency theory*

Menurut Mursalim, teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory, yang membuat suatu model kontraktual antara dua orang atau lebih (pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal.<sup>22</sup> Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun principal diatur dalam kontrak atas persetujuan bersama.

Perusahaan mempunyai banyak kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manejer perusahaan. Dimana antara agen dan prinsipal ingin memaksimalkan utility masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Tetapi di satu sisi agent memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan utilitinya. Sedangkan bagi pemilik modal, dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara

---

<sup>21</sup> Ibid.,

<sup>22</sup> Widyaningdyah, Agnes Utari., Dan Octa Fenny Listiyana, *Kecendrungan Manajemen Laba Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Bursa Efek Indonesia Yang Diprediksi Mengalami Kebangkrutan*, (Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 11, No. 1, 2009), H.23.

efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu terkadang ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajer perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor.<sup>23</sup>

### 3. *Stewardship Theory*

Bila teori *agency* menyatakan bahwa agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda, masing-masing ingin mengoptimalkan kepentingannya. Implikasi hipotetis dari teori *agency* adalah manajer akan cenderung menghindari penurunan nilai aktiva, karena mereka tidak menginginkan *performance* laporan keuangannya menjadi buruk sehingga mereka akan menghindari penerapan standar akuntansi penurunan nilai. Teori *stewardship* memiliki pandangan yang berbeda, bahwa manajer akan berperilaku sebagai *steward*, dan cenderung mengikuti keinginan *principal*.<sup>24</sup>

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *Stewardship* didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principal*nya. Sedangkan menurut Chinn, *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya,

---

<sup>23</sup> Ibid., H.3

<sup>24</sup> Ardianto, *Pengaruh Motivasi, Kekuasaan Dan Orientasi Resiko Terhadap Keterbukaan dan Fleksibilitas Penerapan Standar Akuntansi Penurunan Nilai Aktiva* (Psak No 48.), 2009, H. 1.

mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.<sup>25</sup>

Teori tata laksana (*Stewardship theory*) ini memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.<sup>26</sup>

Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.<sup>27</sup>

#### **4. Akuntansi Pemerintah**

##### **a. Pengertian Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana perusahaan yang tergolong sebagai lembaga mikro. Sehingga akuntansi pemerintah sebagaimana akuntansi perusahaan, digolongkan pula sebagai akuntansi mikro. Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga

---

<sup>25</sup> Usamah, *Peran Kompetensi Dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Tesis Universitas Diponegoro, 2010), H.5.

<sup>26</sup> Puspitasari, Filia., Endang Ernawati, *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha*, Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan, Tahun 3, No. 2, 2010, H. 3.

<sup>27</sup> Raharjo, Eko, *Teori Agency Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*, Fokus Ekonomi, Vol. 2 No. 1, 2007, H. 39.

tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.<sup>28</sup>

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- 1) UUD Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara
- 2) UU dibidang keuangan negara
- 3) UU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBD )
- 4) Peraturan perundang – undang yang mengatur pemerintah negara, khususnya yang mengatur keuangan negara.
- 5) Peraturan perundang – undang yang mengatur tentang pertimbangan keuangan pemerintah dan daerah.
- 6) Ketentuan perundang – undang tetntang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah atau daerah.
- 7) Peraturan perundang – undang lainnya yang mengatur tentang pusat dan daerah.<sup>29</sup>

#### **b. Pengertian Akuntansi Menurut Syariah**

Suatu pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi lain yang menyangkut penyusunan berbagai laporan periodik dari catatan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Laporan-laporan itu yang sifatnya umum ataupun khusus memberikan informasi yang berguna kepada para manajer, pemilik kreditur ataupun debitur, lembaga pemerintah dan masyarakat umum. Yang penting adalah semua pencatatan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah (berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist) serta prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Akuntansi dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan

---

<sup>28</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, (Salemba Empat: Jakarta, 2005), H. 15.

<sup>29</sup> Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), H. 36.



pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban.<sup>30</sup>

Akuntansi menurut perspektif syariah dalam melakukan pencatatan urusan yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnyanya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan

<sup>30</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: P3ei Press, 2008), H. 10.

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan saksiilah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. AlBaqarah : 282).<sup>31</sup>

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah.<sup>32</sup>

### **c. Prinsip dan Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut.

Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. PSAK mendorong penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan khusus apabila diperlukan.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat memberi informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ini dapat berasal dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) perusahaan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali.

---

<sup>31</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Al-Jumanatul 'Ali, (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2004), H. 48

<sup>32</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*. Opcit., H. 11

Disamping sebagai sumber informasi bagi manajemen, pemilik perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen juga berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban (*Accountability*) pada akhir suatu periode.

Laporan keuangan dibuat pada waktu-waktu tertentu untuk menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan laba rugi operasi dalam suatu periode tertentu. Periode yang dimaksud dalam definisi tersebut dapat untuk masa satu bulan, satu kwartal, satu semester, satu tahun atau untuk masa jangka waktu yang lain.

Menurut Belkaoui, laporan keuangan merupakan suatu ikhtisar keuangan yang menyediakan informasi yang mendasari keputusan ekonomi. Maksudnya adalah adanya hubungan langsung suatu relevansi informasi akuntansi dan alokasi sumber daya secara efisien.<sup>33</sup>

Laporan keuangan merupakan laporan yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemen, investor, kreditor, pemerintah masyarakat dan lainnya. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban juga dapat digunakan sebagai indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan.

Menurut Arifin Sabeni, sistem akuntansi suatu lembaga pemerintahan harus :

- 1) Menunjukkan bahwa semua ketentuan hukum dan perundang-undangan telah dipenuhi.
- 2) Menentukan secara wajar dan dengan pengungkapan yang selengkapny atas posisi keuangan dan hasil operasi dana.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksud sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam

---

<sup>33</sup> Ahmad Riahi, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), H. 10.

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut adalah prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

### **1) Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengungkapan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan anggaran akrual untuk pengungkapan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas dalam laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum daerah atau oleh entitas pelapor dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelapor. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **2) Nilai Historis (*Historical Cost*)**

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat diperoleh. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis akan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain, karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar ases atau kewajiban terkait.

### **3) Realisasi (*Realization*)**

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

### **4) Substansi Mengungguli bentuk Formal (*Substance Over Form*)**

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, ini bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkap dengan jelas dan dicatat atas laporan keuangan.

### **5) Periodisitas (*Periodicity*)**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulan, semesteran juga dianjurkan.

### **6) Konsistensi (*Consistency*)**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode oleh suatu entitas pelapor (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa periode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini dalam catatan atas laporan keuangan.

### **7) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat

ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

### **8) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan yang sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, pengguna pertimbangan sehat tidak memperkenalkan misalnya : pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral.<sup>34</sup>

## **5. Pengelolaan Keuangan**

### **a. Pengertian Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan.<sup>35</sup>

Halim mengungkapkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan

---

<sup>34</sup> Arifin Sabeni, *Pokok - Pokok Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Bpfe, 2001), H. 105.

<sup>35</sup> Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2012, Publikasi Tahunan Bank Indonesia*, Bi Jakarta, 2013. H.13

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerinah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>36</sup>

Menurut Syarifudin, pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban”.

Dari pengertian–pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengelolaan keuangan yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Untuk lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.
- 2) Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan.
- 3) Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran.

---

<sup>36</sup> Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke 3.( Salemba Empat: Jakarta, 2007), H. 330.

- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban befungsi untuk memeriksa terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan meliputi berbagai transaksi- transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.

#### **b. Pengelolaan Keuangan Dalam Islam**

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”. (Luqman :34).<sup>37</sup>

Pada masa sekarang ini manusia kurang sadar atau tidak mau sadar sekarang manusia pada umumnya sudah terjebak dalam perekonomian kapitalis, dan kalau hendak melepaskan diri adalah sukar dan payah sekali. Mereka ini terdiri dari golongan manusia yang memberikan hak kekuasaan (imperialisme) kepada modal (kapitalisme), dalam arti yang tidak terbatas. Banyak sekali yang membenci dan menentang imperialisme dan kapitalisme tetapi dalam soal ekonomi ini tidak menolak atau pura – pura tidak menolak<sup>38</sup>. Contohnya adalah dengan memakai salah satu alat dalam system ekonomi kapitalis yaitu system bunga (riba).

Sistem bunga (riba) bukan dari system Islam, tetapi dari system jahiliyah baik yang dahulu ataupun kontemporer-konvensional. Sistem bunga (riba) bukan timbul dari ajaran Wahyu yang bersumber dari Allah Taala. Sistem bunga (riba) jelas haram, diperangi Allah Taala dan Rasul-Nya dan pendapatan yang diperoleh darinya tidak berkah dan dilaknat Allah Taala. Terbukti bahwa individu atau

<sup>37</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Al-Jumanatul 'Ali, Opcit., H. 414

<sup>38</sup> Sobrun Jamil, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Skripsi, ( Yogyakarta: 2002).



kelompok atau negara yang mendapat penghasilan atau membangun dengan menggunakan uang riba ternyata selalu dirundung nestapa dan duka yang tiada hentinya.

Kita tentu masih ingat waktu krisis moneter tahun 1997-1998 yang berimbas kepada krisis perbankan melanda tanah air, suku bunga perbankan mencapai 70%. Walaupun suku bunga sudah mencapai setinggi itu, tetap saja waktu itu para nasabah bank konvensional banyak yang ingin melakukan penarikan dana tabungan besar-besaran dari perbankan. Kalau pemerintah waktu itu tidak turun tangan memulihkan kepercayaan terhadap perbankan nasional dengan memberikan bantuan finansial seperti program BLBI dan program Rekapitalisasi, niscaya semua nasabah perbankan konvensional tsb tidak akan bisa menarik dananya kembali dari perbankan karena perbankan nasional waktu itu banyak yang mengalami kondisi negative spread yaitu suatu kondisi di mana pendapatan bunga dari peminjam lebih kecil daripada beban bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah penabung.

Allah, SWT berfirman di dalam Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)

“...Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. Luqman :34)<sup>39</sup>

Firman Allah, SWT dalam ayat lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  
(١٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.

<sup>39</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Al-Jumanatul 'Ali, Opcit., H. 414

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr ayat 18).<sup>40</sup>

Bila melihat kenyataan dan memperhatikan firman Allah SWT di atas, kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi esok, apakah krisis jilid ke 2 bisa terjadi lagi atau tidak, yang jelas adalah kita diperintahkan Allah, SWT untuk berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak mengalami kerugian di dunia maupun di akhirat kelak.

Oleh karena itu sudah saatnya mulai sekarang kita semua bila tidak ingin rugi dunia dan akhirat, dalam memanage keuangan pribadi maupun perusahaan lebih baik tidak hanya melihat tingginya tingkat suku bunga perbankan jika kita menginvestasikan dana ke perbankan, ataupun tingginya tingkat return hasil apabila dana diinvestasikan bukan di perbankan. Tetapi lebih melihat kepada tingkat amannya yakni apakah dana yang diinvestasikan bisa ditarik kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan tingkat aman yang ideal hanya bisa dicapai apabila kita dalam mengatur keuangan memakai manajemen keuangan Islami yakni mengelola keuangan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

## **6. Sistem Informasi Akuntansi**

### **a. Pengertian Sistem**

Secara luas sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen atau komponenkomponen atau sub-sub sistem yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan hingga tujuan atau sasaran tersebut tercapai. Pengertian sistem menurut ahli:

Menurut Mulyadi: Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah urutan suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi penjualan yang terjadi berulang-ulang.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid., H. 548.

<sup>41</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), H. 5.

Menurut Baridwan: Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.<sup>42</sup>

Sedangkan Menurut Jogiyanto, definisi dari sistem adalah : “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah satu kesatuan dari beberapa prosedur yang saling bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas perusahaan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai. Sistem juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur dimana prosedur-prosedur tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih bagian untuk menjamin setiap kegiatan dilakukan secara beragam untuk menyelesaikan transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

## **b. Pengertian Sistem Informasi**

Menurut Suryantara definisi dari sistem informasi adalah : “Sistem informasi dapat dimaknai sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk menyajikan informasi”.<sup>44</sup>

Pengertian sistem informasi menurut ahli :

Menurut Diana: Sistem informasi, yang kadang kala disebut sebagai sistem pemrosesan data, merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri

---

<sup>42</sup> Baridwan Dan Zaki, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur Dan Metode* (Yogyakarta: Ykpn, 2009), H. 3

<sup>43</sup> Jogiyanto, *Analisis Dan Desain Sistem Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2009), H.1

<sup>44</sup> Suryantara, *Merancang Aplikasi Akuntansi Dengan Vb.Net (Dengan Pendekatan Prosedural Dan Berorientasi Objek)*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2014) H. 4

dari sekumpulan komponen – baik manual ataupun komputer – yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pemakai informasi tersebut.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut Turban mendefinisikan Sistem Informasi : “Proses yang menjalankan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu; kebanyakan sistem informasi dikomputerisasi”.<sup>46</sup> Karena kebanyakan sistem informasi dilakukan secara komputerisasi, penulis juga harus mengetahui pengertian dari sistem informasi berbasis komputer.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diartikan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia, baik manual atau terkomputerisasi yang menjalankan proses mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna untuk pemakai informasi tersebut baik pemakai internal maupun eksternal.

### **c. Pengertian Sistem Informasi Berbasis Komputer**

Pengertian sistem informasi berbasis komputer dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, pekerjaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau unit usaha dapat terlaksana dengan cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Bodnar: “Sistem informasi berbasis komputer merupakan satu rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi informasi yang berguna”.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Turban: “Sistem informasi berbasis komputer (computer-based information system-CBIS) adalah sistem informasi yang

---

<sup>45</sup> Anastasia Diana Dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi (Perancangan, Proses Dan Penerapan)*, (Yogyakarta: Andi, 2011), H. 4.

<sup>46</sup> Efraim Turban Dan Richard E Potter, *Pengantar Teknologi Informasi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), H. 49.

<sup>47</sup> George H Bodnar Dan William S Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), H. 6.

menggunakan teknologi komputer untuk melakukan beberapa atau seluruh pekerjaan yang diberikan”.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi berbasis komputer adalah rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna.

#### **d. Komponen Komponen Sistem Informasi**

Menurut Turban, komponen-komponen dari sistem informasi adalah sebagai berikut :

- 1) Peranti Keras (hardware), adalah serangkaian peralatan seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Bersama-sama, berbagai peralatan tersebut menerima data serta informasi, memprosesnya, dan menampilkannya.
- 2) Peranti Lunak (software), adalah sekumpulan program yang memungkinkan peranti keras untuk memproses data.
- 3) Basis Data (database), adalah sekumpulan arsip (file), tabel, relasi, dan lain-lainnya yang saling berkaitan dan menyimpan data serta sebagai hubungan di antaranya.
- 4) Jaringan (network), adalah sistem koneksi (dengan kabel atau nirkabel) yang memungkinkan adanya berbagai sumber daya antarberbagai komputer yang berbeda.
- 5) Prosedur, adalah serangkaian instruksi mengenai bagaimana menggabungkan berbagai komponen di atas agar dapat memproses informasi dan menciptakan hasil yang diinginkan.
- 6) Orang, adalah berbagai individu yang bekerja dengan sistem informasi, berinteraksi dengannya, atau menggunakan hasilnya.<sup>49</sup>

Dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen dari sistem informasi adalah perangkat keras yaitu berupa komputer beserta kelengkapannya, perangkat

---

<sup>48</sup> Turban Dan Potter, Pengantar Teknologi Informasi, Loccit.

<sup>49</sup> Ibid., H. 49.

lunak seperti program aplikasi, basis data untuk menyimpan informasi, jaringan untuk berbagi informasi, prosedur untuk memproses sistem informasi tersebut dan orang sebagai pengguna ataupun pemakai informasi.

#### **e. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Wiliam dan George dalam buku terjemahan Sistem Informasi Akuntansi edisi kegelapan sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini diasumsikan kepada berbagai pihak pengambil keputusan. Salah satu pihak pengambil keputusan adalah pihak manajemen. Manajemen pada dasarnya membutuhkan informasi tentang:

- 1) Jumlah pendapatan dan biaya yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.
- 2) Posisi keuangan perusahaan, yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu.
- 3) Berbagai informasi manajerial lain yang terinci sebagai pendukung informasi mengenai pendapatan, biaya, aktiva, kewajiban, dan ekuitas seperti misalnya informasi mengenai penjualan, piutang, pembelian, utang, dan lainnya.
- 4) Informasi lain yang harus disajikan kepada para *stakeholder* atau berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti misalnya instansi pajak, bank kreditur, pemegang saham, dan lainnya.

Sistem informasi akuntansi juga berperan sebagai pengaman harta kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur-unsur pengendalian atau pengecekan dalam sistem akuntansi, berbagai kecurangan, penyimpangan, dan kesalahan, dapat dihindarkan atau dilacak sehingga dapat diperbaiki.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Nugroho Wijayanto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), H.4.

#### **f. Tinjauan Islam tentang Sistem Informasi Akuntansi**

Dalam penyelenggaraan perusahaan yang baik tuntutan atas terciptanya pengendalian intern yang dapat dipercaya dan diandalkan dari manajemen sangat diharapkan. Dalam konteks organisasi, pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Salah satunya adalah Informasi akuntansi. Informasi akuntansi berisi informasi bersifat finansial yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan, pengendalian, dan implementasi keputusannya. Media yang digunakan perusahaan dalam menyampaikan informasi akuntansi melalui sistem informasi akuntansi. Dengan sistem informasi akuntansi, segala aktifitas transaksi perusahaan dicatat, diproses dan didistribusikan secara cepat dan akurat bagi pihak – pihak yang membutuhkannya. Mengenai hal tersebut Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”<sup>51</sup>

Ayat diatas mengkaji bagaimana utang-piutang seharusnya dicatat. Pencatatan dalam utang piutang ini mengilhami bagaimana sistem pencatatan akuntansi seperti sistem informasi akuntansi diciptakan. Sehingga proses pencatatan atau pelaporan informasi akuntansi melalui sistem informasi mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu nilai keadilan, dan transparansi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Al-Jumanatul 'Ali, Opcit., H. 48.

<sup>52</sup> Muh Sajja Sudirman, *Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Pt Bintang Manunggal Abadi* (Makasar: Uin Alauddin Makasar, 2016), H. 7.

### **g. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi yang baik diharapkan dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna informasi baik internal maupun eksternal yang nantinya digunakan dalam mengambil keputusan. Sistem informasi yang baik dirancang untuk dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu, relevan dan dipercaya. Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart adalah:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut.
- b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-asset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal.<sup>53</sup>

## **B. Kajian Terdahulu**

Penelitian tentang tata kelola keuangan, sistem informasi akuntansi dan good governance telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian Permata Sari, Dindy, Ilyas dan Fitrawati tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong”<sup>54</sup>; penelitian Hari Sriwijayanti tahun 2018 dengan judul “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem

---

<sup>53</sup> Romney, Marshal B., Dan Steinbart, Paul John. *Accounting Information Systems* (USA: Cengage Learning, 2009), H. 29.

<sup>54</sup> Permata Sari, Dindy Dan Ilyas, Fitrawati. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong*, (Thesis, 2016).



Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD”<sup>55</sup>; penelitian Trimo Sujadijaya tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Bandung)”<sup>56</sup>; penelitian Fitriani Saragih tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap *Good Government Governance* Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se-kota Medan”<sup>57</sup>; penelitian Yusniyar, Darwanis, Syukriy Abdullah tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance* dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh)”<sup>58</sup>. Secara ringkas penelitian-penelitian di atas dapat dilihat pada table 2.1.

**Tabel 2.1 Kajian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Permata Sari, Dindy and Ilyas, Fitrawati. (2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis data yang digunakan adalah analisis Partial Least Square (PLS). X <sub>1</sub> : Kompetensi Sumber Daya	Hasil penelitian: (1) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. (2) Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terbukti berpengaruh positif terhadap efektivitas

<sup>55</sup> Hari Sriwijayanti, *Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Apbd* (Jurnal Ekobistek Fakultas Ekonomi, 2018).

<sup>56</sup> Trimo Sujadijaya, *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pt Kareta Api Indonesia (Persero) Kota Bandung)* (Bandung: Skripsi Universitas Pasundan, 2018).

<sup>57</sup> Fitriani Saragih, *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se-Kota Medan*, Konferensi Ilmiah Akuntansi I (Jakarta, 2014).

<sup>58</sup> Yusniyar, Darwanis Dan Syukriy Abdullah, *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Skpa Pemerintah Aceh)*, Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, (Aceh, 2016).

		Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong	Manusia, $X_2$ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, $X_3$ : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi; dan Y: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong; dan (3) Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
2.	Hari Sriwijayanti (2018)	Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode analisa yang digunakan adalah model regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis secara parsial dengan uji t dan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis secara simultan dengan uji F. $X_1$ : Transparansi, $X_2$ : Akuntabilitas, $X_3$ : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah ; dan Y: Pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola APBD tentang transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD baik secara parsial maupun simultan. Dari hasil penelitian diharapkan kepada pejabat pengelola APBD untuk lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan SIAKD dalam pengelolaan anggaran pada SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang

			APBD	
3.	Trimo Sujadijaya (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada PT Karet Api Indonesia (Persero) Kota Bandung)	Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif. X: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Y: Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara persial penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Fitriani Saragih (2014)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap <i>Good Government Governance</i> Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se-kota Medan	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode analisa yang digunakan adalah model regresi linear berganda. X <sub>1</sub> : Penerapan Akuntansi Pemerintahan, X <sub>2</sub> : Kualitas Informasi Akuntansi; dan Y: <i>Good Government Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>good government governance</i>
5.	Yusniyar, Darwanis, Syukriy Abdullah (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap <i>Good Governance</i> dan Dampaknya	Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan analisis jalur dan pengujian hipotesis. X <sub>1</sub> : Penerapan Sistem	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap <i>good governance</i> . sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern dan

		pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh)	Akuntansie Pemerintahan, $X_2$ : Pengendalian Intern; dan Y: <i>Good Governance</i>	<i>good governance</i> baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
--	--	--	---	--

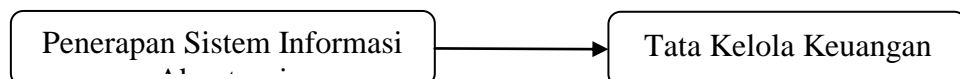
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada jumlah variabel yang digunakan, penelitian ini menggunakan satu variabel independen yaitu sistem informasi akuntansi dan satu variabel dependen yaitu tata kelola keuangan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan metode regresi linier sederhana. Tempat penelitian dilakukan di tempat yang berbeda yaitu di bpjs ketenagakerjaan cabang Medan Utara.

### C. Kerangka Pemikiran

Penerapan sistem informasi akuntansi akan memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan, laporan keuangan yang baik menunjukkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Kualitas laporan keuangan yang baik menggambarkan keadaan badan atau perusahaan dengan kondisi keuangan yang positif dan terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sehingga menggambarkan tata kelola keuangan yang baik.

Semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi diberlakukan maka proses pelaporan keuangan akan semakin efektif dan efisien. Akibatnya kualitas laporan keuangan meningkat. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan otomatis pengelolaan keuangan semakin baik dan menunjukkan tata kelola keuangan yang baik bagi perusahaan. Maka bentuk kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara dari suatu permasalahan yang dihadapi, yang masih mengandung kemungkinan benar atau salah atau yang kebenarannya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Dalam penelitian ini, mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis ( $H_a$ ) :Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap Tata Kelola Keuangan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.

Hipotesis ( $H_0$ ) :Penerapan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tata Kelola Keuangan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif juga diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>59</sup>

##### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Cabang Medan Utara yang berlokasi di Jalan Gunung Krakatau No.17A, Medan Timur. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu satu bulan dimulai setelah surat riset diatuhkan tanggal 15 Oktober 2018.

##### **C. Populasi Dan Sampel**

###### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini, adalah seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, yakni berjumlah 37 orang. Daftar jumlah karyawan per bagian kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara adalah:

**Tabel 3.1**

**Jumlah Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara**

<b>Bagian</b>	<b>Jumlah Karyawan</b>
Penata Madya TI	1
Petugas Pemeriksa 4	1
Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM)	6
Pemasaran	14
Keuangan & IT	5
Pelayanan	11
Total	37

Sumber: Arsip BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara

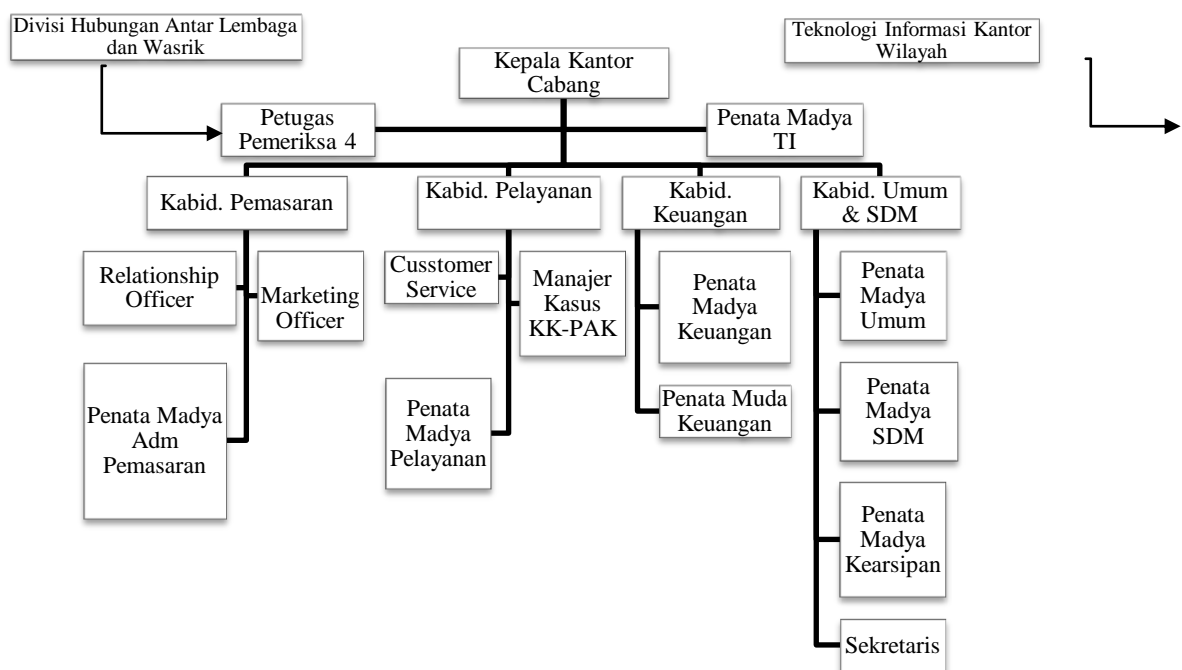
---

<sup>59</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D (Bandung:Al-Fabeta, 2010), 7

## 2. Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh atau sensus. *Sampling* jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain *sampling* jenuh adalah sensus.<sup>60</sup> Dengan jumlah populasi 37 orang, maka jumlah sampel adalah 37 orang yang merupakan seluruh pimpinan dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara. Alasan utama pengambilan karena seluruh pimpinan dan karyawan menggunakan aplikasi SMILE yang merupakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer di BPJS Ketenagakerjaan.

Di bawah ini merupakan gambaran struktur organisasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan sampel yang diambil peneliti:



Sumber: Arsip BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan  
Cabang Medan Utara**

<sup>60</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D, 2008:78

## **D. Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini data yang dihimpun adalah terkait tentang penerapan istem informasi akuntansi dan tata kelola keuangan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara . Data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara, penyebaran kuesioner, observasi maupun dokumentasi yang dilakukan peneliti selama berada di lapangan.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal maupun eksternal.<sup>61</sup> Dalam hal ini data yang dihimpun adalah sejarah, visi & misi, dan struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan. Data-data tersebut diperoleh dari dokumentasi atau buku-buku literatur.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, skala likert (*likert scale*) yaitu teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk

---

<sup>61</sup> Nur Indrintoro, 2002, *Metodelogi Penelitian Bisnis: untuk Akutansi dan Manajemen*, Yogyakarta, BPFE. Halaman 149



menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>62</sup> Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana SOP (Standar Operasioanal Prosedur) yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara.

## 2. Skala

Skala disusun untuk mengungkap sikap pro-kontra positif dan negative, setuju-tidak setuju terhadap objek sosial. Skala berisi pernyataan-pernyataan sikap (*attitude statements*), yaitu suatu pernyataan mengenai objek sikap. Dalam hal ini peneliti menggunakan skala *likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.<sup>63</sup> Dalam skala *likert* ini ada dua pernyataan sikap, yaitu pernyataan yang bersifat mendukung (*favorable*) dan pernyataan yang tidak mendukung (*unfavorable*). Dimana dalam skala ini terdapat lima pilihan jawaban yakni sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

## 3. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>64</sup> Dalam hal ini observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi ini bertujuan adalah agar peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam berbagai situasi dan kondisi, jadi peneliti dapat memperoleh pandangan yang *holistik* atau menyeluruh.

---

62 Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), H. 140

63 Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), H.136.

64 Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi Interdisipliner untuk Ilmu Sosial, Ekonomi/ Ekonomi Islam, Agama, Manajemen dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), H.186.

## F. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian ini maka variabel-variabel tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan yang dimaksud adalah tata kelola keuangan yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam penerapan *good governance* yang menjadi objek penelitian.

### 2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang dimaksud adalah sistem informasi akuntansi yang dipakai oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara seperti SIJSTK, SMILE, dll yang menjadi objek penelitian.

**Tabel 3.2**

**Indikator Penilaian Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Item
Y: Tata Kelola Keuangan	<i>Transparency</i>	1 Penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.	1
		2 Pengungkapan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan BPJS Ketenagakerjaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan.	2,3,4
		3 Menjaga kerahasiaan informasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5

	<b>Accountability</b>	1 Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi badan.	6,7
		2 Memastikan adanya sistem pengendalian intern yang efektif dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan.	8
		3 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berpegang pada peraturan dan kode etik.	9
		4 Membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas secara periodik dan berkesinambungan.	10
	<b>Responsibility</b>	1 Berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	11,12, 13
		2 Bertanggung jawab atas risiko usaha yang terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	14
		3 Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai, sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.	15

	<b><i>Independency</i></b>	<p>1 Tidak terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.</p> <p>2 Pelaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3 Melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4 Saling menghormati kewajiban, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak dari masing-masing.</p>	<p>16,17, 18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p>
	<b><i>Fairness</i></b>	<p>1 Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada para pemangku kepentingan</p>	<p>22,23, 24,25</p>
X:Sistem Informasi Akuntansi	<b>Sumber Daya Manusia</b>	<p>1 Pendidikan</p> <p>2 Pelatihan</p> <p>3 Bimbingan teknis</p> <p>4 Pengalaman kerja</p> <p>5 Wawasan sistem informasi akuntansi</p>	<p>26</p> <p>27,28</p> <p>29,30</p> <p>31</p> <p>32</p>
	<b>Peralatan</b>	<p>1 Ketersediaan peralatan yang memadai</p> <p>2 Kelayakan peralatan yang digunakan untuk proses akuntansi</p>	<p>33,34</p> <p>35</p>

		3 Penggunaan peralatan	36
	<b>Pengendalian Internal dan Keamanan Data Sistem</b>	1 Sistem operasi	37
		2 Bersifat multi akses	38,39
	<b>Prosedur</b>	1 Pengumpulan data	40,41, 42
		2 Memproses data	43,44
		3 Penyimpanan data	45,46
	<b>Data</b>	1 Data aktivitas bisnis	47,48, 49,50

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode analisis regresi linier sederhana. Metode tersebut digunakan untuk meramalkan pengaruh dari suatu variabel terikat (tata kelola keuangan) berdasarkan variabel bebas (penerapan sistem informasi akuntansi). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS, kemudian dijelaskan secara deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan beberapa tahapan.

#### 1. Analisis Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum dari jawaban kuesioner dari masing-masing variabel. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Tabulasikan jawaban kuesioner
- 2) Kelompokkan jawaban kuesioner
- 3) Jumlahkan skor masing-masing kelompok jawaban kuesioner
- 4) Total skor secara keseluruhan
- 5) Bandingkan total skor setuju dengan sangat setuju dengan total skor
- 6) keseluruhan.

- 7) Buat kesimpulan mengenai hasil kuesioner.

$$\frac{\text{Total skor setuju dan sangat setuju}}{\text{Total skor}} \times 100$$

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis dapat diklasifikasikan secara umum, yaitu:

- 1) Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi untuk menjawab apakah sistem informasi akuntansi pada BPJS Keteagakerjaan Cabang Medan Utara telah berfungsi dengan baik atau tidak adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Klasifikasi Champion mengenai sistem informasi akuntansi**

<b>Persentase Skor</b>	<b>Kategori Skor</b>
0 – 25%	Sangat Rendah/ Tidak Baik
26 – 50%	Rendah/ Kurang Baik
<b>Persentase Skor</b>	<b>Kategori Skor</b>
51 – 75%	Cukup Tinggi/ Cukup Baik
76 – 100%	Tinggi/ Baik

- 2) Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi untuk menjawab apakah sistem informasi akuntansi pada BPJS Keteagakerjaan Cabang Medan Utara telah berfungsi dengan baik atau tidak adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Klasifikasi Champion mengenai tata kelola keuangan**

<b>Persentase Skor</b>	<b>Kategori Skor</b>
0 – 25%	Sangat Rendah/ Tidak Baik
26 – 50%	Rendah/ Kurang Baik
51 – 75%	Cukup Tinggi/ Cukup Baik
76 – 100%	Tinggi/ Baik

## 2. Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian ini tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki tingkat keandalan (*reliability*) dan tingkat kebenaran/keabsahan (*validity*) yang tinggi. Pengujian pengukuran tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

### a. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*. Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas:

- 1) Jika  $t$ -hitung positif dan  $r$ -hitung  $> r$ -tabel maka butir pertanyaan tersebut valid pada signifikansi 0,05 (5%).
- 2) Jika  $t$ -hitung positif dan  $r$ -hitung  $> r$ -tabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- 3)  $r$ -hitung dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation*.

### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap pernyataan yang sama menggunakan alat ukur yang sama pula. Besarnya nilai reliabilitas ditunjukkan dengan nilai koefisiennya, yaitu koefisien

reliabilitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ), dimana suatu instrumen dapat dinyatakan handal (*reliable*) bila  $\alpha > 0,60$ .

### c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dalam model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang distribusi data normal atau mendekati normal.<sup>65</sup> Cara mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi sumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.<sup>66</sup>

## 3. Uji Hipotesis

### a. Uji t

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan Uji Parsial (Uji t) yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengendalian *intern* sebagai variabel independen memberikan pengaruh pada SIA Penerimaan Kas sebagai variabel dependen.

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan  $t_{tabel}$ . Untuk menentukan nilai  $t_{tabel}$  ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-2)$  dimana n adalah jumlah responden. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$  maka  $H_a$  diterima
- 2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$  maka  $H_0$  ditolak

---

<sup>65</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), h.147

<sup>66</sup> Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h.213



### **b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) nol, berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, koefisien determinasi ( $R^2$ ) dipergunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).

### **c. Uji Regresi Linier Sederhana**

Hipotesis dalam penelitian ini yakni apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Tata Kelola Keuangan sehingga model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi sederhana yaitu hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan :

Y :Tata Kelola Keuangan

X :Sistem Informasi Akuntansi

$\alpha$  :Konstanta

$\beta$  :Koefisien regresi (**nilai peningkatan ataupun penurunan**)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan**

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan

kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## 2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara. Peneliti menyebar 37, tetapi hanya 36 kuesioner yang bisa dijadikan data penelitian. Tingkat pengembalian (respon rate) sebesar 97,3% dikarenakan 1 kuesioner tidak kembali.

**Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	37	100%
Kuesioner yang tidak kembali	1	2,7%
Kuesioner yang dapat diolah	36	97,3%
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>97,3%</b>

Sumber: Data olahan 2018

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja.

### a. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 22 responden (61%), dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 responden (39%).

**Table 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Wanita	22	61%
Pria	14	39%
Jumlah	36	100%

Sumber: Data olahan 2018

### b. Usia

Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur kurang 25-35 tahun yaitu sebanyak 26 responden (72,2%), dilanjutkan dengan umur antara 36-45 tahun sebanyak 5 responden (14%), dilanjutkan responden yang berumur dibawah 25 tahun sebanyak 4 responden (11,1%), dilanjutkan dengan responden berumur 46-55 tahun sebanyak 1 responden (2,7%). Tidak ada responden yang berumur diatas 55 tahun.

**Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
<25	4	11,1%
25-35	26	72,2%
36-45	5	14%
46-55	1	2,7%
>56	0	0%
<b>Total</b>	36	100%

Sumber: Data olahan 2018

### c. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan S-1 yaitu sebanyak 20 responden (55,6%), tingkat pendidikan S-2 sebanyak 9 responden (25%), tingkat pendidikan D-3 sebanyak 4 responden (11,1%) dan Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan S-3 sebanyak 3 responden (8,3%). Tidak ada responden dengan tingkat pendidikan SMU/SMK.

**Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SMU/SMK	0	0%
D-3	4	11,1%
S-1	20	55,6%
S-2	9	25%
S-3	3	8,3%
<b>Total</b>	36	100%

Sumber: Data olahan 2018

#### d. Masa Kerja

Berdasarkan masa kerja, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini telah bekerja selama 1-5 tahun sebanyak 13 responden (36,1%), telah bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 10 responden (27,9%), telah bekerja selama 11-15 tahun sebanyak 7 responden (19,4%), telah bekerja selama 16-20 tahun sebanyak 3 responden (8,3%) dan telah bekerja kurang dari 1 tahun sebanyak 3 responden (8,3%). Sedangkan telah bekerja di atas 21 tahun tidak terdapat di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara.

**Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja**

Masa Kerja (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
<1	3	8,3%
1-5	13	36,1%
6-10	10	27,9%
11-15	7	19,4%
16-20	3	8,3%
21-25	0	0%
26-30	0	0%
>31	0	0%
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data olahan 2018

### 3. Deskripsi Variabel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 36 responden melalui penyebaran kuesioner, untuk mendapat kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Tabel Rentan Skor Kuesioner**

Penilaian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Data olahan 2018

### a. Variabel Sistem Informasi Akuntansi

Variabel sistem informasi akuntansi diukur melalui 25 bulir pernyataan yang dinyatakan dalam kuesioner. Adapun 25 bulir pada variabel sistem informasi akuntansi antara lain:

- 1) X-P1 = Karyawan ditempatkan pada bidang kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan karyawan.
- 2) X-P2 = Perusahaan memberikan pelatihan untuk meningkatkan *skill*, keterampilan dan *knowledge* karyawan (SDM).
- 3) X-P3 = Perusahaan memberikan bimbingan teknis untuk menggali dan meningkatkan kompetensi karyawan.
- 4) X-P4 = Perusahaan memberikan bimbingan teknis secara kontinuitas kepada karyawan untuk terus meningkatkan kompetensi karyawan.
- 5) X-P5 = Karyawan memiliki pengalaman kerja yang memadai dalam posisi/bidang kerja yang diduduki.
- 6) X-P6 = Karyawan mempunyai wawasan yang luas mengenai Sistem Informasi Akuntansi perusahaan.
- 7) X-P7 = Peralatan sistem informasi akuntansi yang disediakan perusahaan sudah lengkap seperti software, hardware dan jaringan internet.
- 8) X-P8 = Perusahaan menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk memudahkan pekerjaan.
- 9) X-P9 = Seluruh peralatan sistem informasi akuntansi seperti software, hardware dan jaringan internet. yang disediakan perusahaan masih layak digunakan.
- 10) X-P10 = Pengguna sistem informasi akuntansi mampu mengoperasikan peralatan sistem informasi akuntansi dengan baik dan benar.
- 11) X-P11 = Sistem operasi yang digunakan mendukung proses sistem informasi akuntansi berbasis komputer perusahaan.
- 12) X-P12 = Pengendalian internal membentuk pengendalian akuntansi dan pengendalian administrasi guna mendukung keamanan data sistem.

- 13) X-P13 = Keamanan data yang digunakan mencakup aspek *confidentially*, *integrity*, *availability*, *privacy*, *identification*, *authentication*, *authorization* dan *accountability*.
- 14) X-P14 = Keamanan data sistem menggunakan strategi *phsycal security* (keamanan dari bencana seperti kebakaran, gempa, dll), *personal security* (keamanan personal), *operation security* (keamanan kemampuan organisasi), *communication security* (keamanan media komunikasi) dan *network security* (keamanan peralatan jaringan ataupun data organisasi).
- 15) X-P15 = Data dikumpulkan mengikuti aturan SOP (*Standard Operating Procedures*)
- 16) X-P16 = SOP setiap bidang kerja memberikan instruksi jelas dan memadai dalam proses pengumpulan data.
- 17) X-P17 = Data yang dikumpulkan memiliki informasi yang lengkap atau memadai untuk tahap selanjutnya yaitu pengelolaan data.
- 18) X-P18 = Pengelolaan data mengikuti aturan SOP (*Standard Operating Procedures*).
- 19) X-P19 = Pengelolaan data dilakukan dengan cepat sehingga dapat tepat waktu dalam memberikan informasi.
- 20) X-P20 = Data yang disimpan menggunakan tingkat keamanan yang tinggi.
- 21) X-P21 = Data disimpan sesuai klasifikasi tertentu yang telah ditetapkan perusahaan dan sesuai SOP
- 22) X-P22 = Data yang digunakan bersifat objektif, valid dan relevan.
- 23) X-P23 = Data memenuhi kriteria yang terdapat dalam ketentuan data pada SOP.
- 24) X-P24 = Data dilengkapi informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan data.
- 25) X-P25 = Data sudah dimutakhirkan atau diperbaharui untuk kebutuhan pengguna dan tujuan informasi akuntansi.



Hasil tanggapan variabel sistem informasi akuntansi dapat dijelaskan pada tabel 4.7:

**Tabel 4.7 Tanggapan Mengenai Tunjangan Kinerja**

No	Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Total	
		F	%	F	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	X-P1	8	22,2	17	47,2	11	30,6	-	-	-	-	36	100
2	X-P2	13	36,1	16	44,4	7	19,5	-	-	-	-	36	100
3	X-P3	8	22,2	18	50	10	27,8	-	-	-	-	36	100
4	X-P4	17	47,2	17	47,2	2	5,6	-	-	-	-	36	100
5	X-P5	16	44,4	19	52,8	1	2,8	-	-	-	-	36	100
6	X-P6	6	16,7	26	72,2	3	8,3	1	2,8	-	-	36	100
7	X-P7	6	16,7	21	58,3	9	25	-	-	-	-	36	100
8	X-P8	16	44,4	20	55,6	-	-	-	-	-	-	36	100
9	X-P9	6	16,7	21	58,3	9	25	-	-	-	-	36	100
10	X-P10	8	22,2	17	47,2	11	30,6	-	-	-	-	36	100
11	X-P11	6	16,7	21	58,3	9	25	-	-	-	-	36	100
12	X-P12	16	44,4	20	55,6	-	-	-	-	-	-	36	100
13	X-P13	15	41,6	20	55,6	1	2,8	-	-	-	-	36	100
14	X-P14	5	13,9	28	77,8	3	8,3	-	-	-	-	36	100
15	X-P15	8	22,2	17	47,2	11	30,6	-	-	-	-	36	100
16	X-P16	16	44,4	20	55,6	-	-	-	-	-	-	36	100
17	X-P17	8	22,2	20	55,6	8	22,2	-	-	-	-	36	100
18	X-P18	5	13,9	28	77,8	3	8,3	-	-	-	-	36	100
19	X-P19	6	16,7	21	58,3	9	25	-	-	-	-	36	100
20	X-P20	14	38,9	21	58,3	1	2,8	-	-	-	-	36	100
21	X-P21	17	47,2	18	50	1	2,8	-	-	-	-	36	100
22	X-P22	18	50	18	50	-	-	-	-	-	-	36	100
23	X-P23	6	16,7	21	58,3	9	25	-	-	-	-	36	100
24	X-P24	16	44,4	17	47,2	3	8,3	-	-	-	-	36	100
25	X-P25	16	44,4	20	55,6	-	-	-	-	-	-	36	100
Total		276	30,7	502	55,8	121	13,4	1	0,1	-	-	900	100

Sumber: Data olahan 2018

Tanggapan responden sebagaimana di tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada pernyataan pertama, dengan nilai frekuensi sebesar 17 poin dan nilai frekuensi sebesar 47,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya setiap karyawan ditempatkan pada bidang kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pernyataan kedua, dengan nilai frekuensi sebesar 16 poin dan nilai

frekuensi sebesar 44,4 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelatihan untuk meningkatkan *skill*, keterampilan dan *knowledge* para karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Pernyataan ketiga, dengan nilai frekuensi sebesar 18 poin dan nilai frekuensi sebesar 50 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan memberikan bimbingan teknis kepada semua karyawan BPJS Ketenagakerjaan untuk menggali dan meningkatkan kompetensi karyawan. Pernyataan keempat, dengan nilai frekuensi sebesar 17 poin dan nilai frekuensi sebesar 47,2 persen responden menunjukkan respon sangat setuju bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan memberikan bimbingan teknis secara kontinuitas kepada karyawan untuk terus meningkatkan kompetensi karyawan.

Pernyataan kelima, dengan nilai frekuensi sebesar 19 poin dan nilai frekuensi sebesar 52,8 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya semua karyawan memiliki pengalaman kerja yang memadai dalam posisi/bidang kerja yang diduduki. Pernyataan keenam, dengan nilai frekuensi sebesar 26 poin dan nilai frekuensi sebesar 72,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya para karyawan mempunyai wawasan yang luas mengenai sistem informasi akuntansi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan berupa SMILE.

Pernyataan ketujuh, dengan nilai frekuensi sebesar 21 poin dan nilai frekuensi sebesar 58,3 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya peralatan untuk sistem informasi akuntansi yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan sudah lengkap seperti software, hardware dan jaringan internet. Pernyataan kedelapan, dengan nilai frekuensi sebesar 20 poin dan nilai frekuensi sebesar 55,6 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya Perusahaan menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk memudahkan pekerjaan.

Pernyataan kesembilan, dengan nilai frekuensi sebesar 21 poin dan nilai frekuensi sebesar 58,3 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya seluruh peralatan sistem informasi akuntansi yang tersedia di BPJS Ketenagakerjaan seperti software, hardware dan jaringan internet masih layak digunakan. Pernyataan kesepuluh, dengan nilai frekuensi sebesar 17 poin dan nilai

frekuensi sebesar 47,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya Pengguna sistem informasi akuntansi mampu mengoperasikan peralatan sistem informasi akuntansi dengan baik dan benar.

Pernyataan kesebelas, dengan nilai frekuensi sebesar 21 poin dan nilai frekuensi sebesar 58,3 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya sistem operasi yang digunakan mendukung proses sistem informasi akuntansi berbasis komputer perusahaan. Pernyataan kedua belas, dengan nilai frekuensi sebesar 20 poin dan nilai frekuensi sebesar 55,6 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya pengendalian internal yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan membentuk pengendalian akuntansi dan pengendalian administrasi yang berguna untuk mendukung keamanan data sistem.

Pernyataan ketiga belas, dengan nilai frekuensi sebesar 20 poin dan nilai frekuensi sebesar 55,6 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya keamanan data yang digunakan di BPJS Ketenagakerjaan mencakup aspek *confidentially*, *integrity*, *availability*, *privacy*, *identification*, *authentication*, *authorization* dan *accountability*. Pernyataan keempat belas, dengan nilai frekuensi sebesar 28 poin dan nilai frekuensi sebesar 77,8 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya keamanan data sistem di BPJS Ketenagakerjaan menggunakan strategi *physical security* (keamanan dari bencana seperti kebakaran, gempa, dll), *personal security* (keamanan personal), *operation security* (keamanan kemampuan organisasi), *communication security* (keamanan media komunikasi) dan *network security* (keamanan peralatan jaringan ataupun data organisasi).

Pernyataan kelima belas, dengan nilai frekuensi sebesar 17 poin dan nilai frekuensi sebesar 47,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya data yang dikumpulkan mengikuti aturan SOP (*Standard Operating Procedures*). Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.<sup>67</sup> SOP yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi dan tata kelola keuangan adalah sebagai berikut: SOP mengenai pengelolaan keuangan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara yang ada hanya mengenai pembayaran iuran peserta, klaim dan belanja untuk rumah tangga ataupun kegiatan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, di luar dari ini dilakukan oleh pusat seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak, dan lain-lain. Pada dasarnya pola pengelolaan untuk kegiatan pembayaran diatas sama, yaitu: pengajuan transaksi masuk ke bidang keuangan baik dari bidang pemasaran yaitu pembayaran iuran peserta; bidang umum yaitu belanja untuk rumah tangga ataupun kegiatan; maupun bidang pelayanan yaitu klaim jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Prosedur ini digunakan untuk transaksi yang dilakukan secara tunai. Pertama, dilakukan verifikasi untuk setiap berkas yang masuk. Verifikasi dilakukan oleh penata madya keuangan, penata madya keuangan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Setelah berkas sudah sesuai peraturan kelengkapan berkas, diberikan tanda sudah diverifikasi dan diberikan kepada kepala bidang keuangan untuk persetujuan (*approved*) berkas. Kepala bidang keuangan akan melakukan pengecekan ulang, apabila berkas yang diajukan sudah sesuai syarat dan ketentuan maka dilanjutkan pelaporan kepada kepala cabang, tetapi jika tidak maka dikembalikan kepada penata madya untuk diperbaiki ulang. Setelah kepala bidang menyetujui, berkas diberikan kepada kacab (kepala cabang) untuk dilaporkan. Untuk otorisasi transaksi dibawah Rp 10.000.000; diotorisasi oleh kepala bidang keuangan, tetapi transaksi diatas Rp 10.000.000; diotorisasi oleh kepala cabang. Setelah dilaporkan kepada kepala cabang, bidang keuangan membuat voucher lalu melakukan pembayaran ke bank. Setelah pembayaran ke bank, dari pihak bank akan memberikan kwitansi pembayaran. Pembayaran dari kwitansi itu dilakukan entry ke jurnal. Jika prosedur yang dilakukan melalui pembayaran transfer bidang keuangan, hanya tinggal mengolahnya melalui aplikasi SMILE baik itu dari

---

<sup>67</sup>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan








verifikasi sampai pelaporan ke kacab dan entry juga menggunakan aplikasi SMILE. Untuk kelengkapan data yang dibutuhkan selama proses verifikasi berupa kelengkapan dokumen yang masuk, misalnya untuk iuran dokumen yang dibutuhkan adalah KTP peserta, formulir, SIPP, foto copy rekening tabungan dan dokumen wajib lainnya bersama dengan kode iuran. Saat proses verifikasi diperiksa kelengkapan data jika sudah sesuai outputnya data yang diverifikasi melalui aplikasi SMILE, lalu masuk ke link kepala bidang keuangan yang selanjutnya di *approve*, untuk kelengkapan *approve* sama dengan kelengkapan verifikasi, *output* dari *approve* adalah voucher. Selanjutnya pelaporan kepada kepala cabang, voucher yang sudah dibuat tadi diberikan kepada kepala cabang. Setelah penandatanganan oleh kepala cabang baru dilakukan pembayaran ke bank outputnya kwitansi pembayaran, setelah itu di jurnal hampir semua prosedur menggunakan aplikasi SMILE dan waktu untuk proses bisa sekitar 15 menit untuk setiap prosedur kecuali saat pelaporan kepada kepala cabang bisa sekitar 20 menit. Berdasarkan penjelasan diatas format dari SOP Keuangan seperti gambar 4.1.

Pernyataan keenam belas, dengan nilai frekuensi sebesar 20 poin dan nilai frekuensi sebesar 55,6 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya SOP setiap bidang kerja dalam struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan memberikan instruksi jelas dan memadai dalam proses pengumpulan data.

Pernyataan ketujuh belas, dengan nilai frekuensi sebesar 20 poin dan nilai frekuensi sebesar 55,6 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya data yang dikumpulkan memiliki informasi yang lengkap atau memadai untuk tahap selanjutnya yaitu pengelolaan data. Pernyataan kedelapan belas, dengan nilai frekuensi sebesar 28 poin dan nilai frekuensi sebesar 77,8 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya setiap pengelolaan data mengikuti aturan SOP (*Standard Operating Procedures*) BPJS Ketenagakerjaan masing-masing bidang kerja.

Pernyataan kesembilan belas, dengan nilai frekuensi sebesar 21 poin dan nilai frekuensi sebesar 58,3 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya pengelolaan data di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan cepat sehingga dapat tepat waktu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan bagi

para pemangku kepentingan. Pernyataan kedua puluh, dengan nilai frekuensi sebesar 21 poin dan nilai frekuensi sebesar 58,3 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya penyimpanan data BPJS Ketenagakerjaan memiliki tingkat keamanan data yang tinggi.

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Penata Madya Keuangan	Kepala Bidang Keuangan	Kepala Cabang	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Melakukan verifikasi terhadap transaksi dengan dokumen dan kelengkapan berkas yang masuk				Dokumen transaksi	15	Data verifikasi	S O P  K E U A N G A N
2	Memeriksa transaksi yang sudah diverifikasi, jika setuju melaporkan kepada kepala cabang jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada penata madya untuk diperbaiki.	 Tidak Ya			Data verifikasi	15	Voucher	
3	Otorisasi transaksi yang disetujui, menandatangani otorisasi jika nominal dibawah Rp 10 juta dilakukan oleh kabid jika diatas Rp 10 juta dilakukan oleh kacab				Voucher	15	Voucher yang sudah diotorisasi	
4	Memeriksa laporan transaksi dan menandatangani transaksi yang sudah disapprove				Voucher	20	Voucher yang sudah diotorisasi	
5	Memeriksa voucher dan melakukan pembayaran ke Bank				Voucher yang sudah diotorisasi	15	Kwitansi	
6	Melakukan entry ke dalam jurnal				Kwitansi	15	Jurnal	

Sumber: Data olahan 2018

**Gambar 4.1 Flowchart Keuangan**

Pernyataan kedua puluh satu, dengan nilai frekuensi sebesar 18 poin dan nilai frekuensi sebesar 50 persen responden menunjukkan respon sangat setuju bahwasanya data yang disimpan disesuaikan dengan klasifikasi tertentu yang telah ditetapkan perusahaan dan telah sesuai dengan SOP. Pernyataan kedua puluh dua, dengan nilai frekuensi sebesar 21 poin dan nilai frekuensi sebesar 58,3 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya data yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan bersifat objektif, valid dan relevan.

Pernyataan kedua puluh tiga, dengan nilai frekuensi sebesar 21 poin dan nilai frekuensi sebesar 58,3 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya data memenuhi kriteria yang terdapat dalam ketentuan format data pada SOP di BPJS Ketenagakerjaan. Pernyataan kedua puluh empat, dengan nilai frekuensi sebesar 17 poin dan nilai frekuensi sebesar 47,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya semua data yang akan dikelola dilengkapi informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan data.

Pernyataan kedua puluh lima, dengan nilai frekuensi sebesar 20 poin dan nilai frekuensi sebesar 55,6 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya setiap data yang ada sudah dimutakhirkan atau diperbaharui untuk kebutuhan pengguna dan tujuan informasi akuntansi.

#### **b. Variabel Tata Kelola Keuangan**

Variabel tata kelola keuangan diukur melalui 25 bulir pernyataan yang dinyatakan dalam kuesioner. Adapun 25 bulir pada variabel tata kelola keuangan antara lain:

- 1) Y-P1 = Penyediaan informasi keuangan dilakukan dengan cepat, akurat, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Y-P2 = Pengungkapan informasi keuangan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi.
- 3) Y-P3 = Pengungkapan informasi keuangan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kepentingan BPJS Ketenagakerjaan.

- 4) Y-P4 = Pengungkapan informasi keuangan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kebutuhan pihak yang berkepentingan.
- 5) Y-P5 = Kerahasiaan informasi keuangan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Y-P6 = Rincian tugas dan tanggung jawab bidang kerja dibuat secara jelas dan selaras dengan visi dan misi badan.
- 7) Y-P7 = Rincian tugas dan tanggung jawab bidang kerja dibuat secara jelas dan selaras dengan sasaran usaha dan strategi badan.
- 8) Y-P8 = Sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan.
- 9) Y-P9 = Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah berpegang pada peraturan dan kode etik.
- 10) Y-P10 = Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.
- 11) Y-P11 = Penyajian keuangan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12) Y-P12 = Penyajian laporan keuangan mengikuti prosedur pelaporan keuangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 13) Y-P13 = Penyajian keuangan berpegang pada prinsip kepatuhan, audit intern dan ekstern diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Y-P14 = Bertanggung jawab atas risiko usaha yang terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15) Y-P15 = Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dibuat dengan perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
- 16) Y-P16 = Tidak adanya dominasi oleh pihak manapun dalam pengambilan keputusan sehingga dapat dilakukan secara obyektif.
- 17) Y-P17 = Tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.



- 18) Y-P18 = Bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan dilakukan secara obyektif.
- 19) Y-P19 = Pelaksanaan fungsi dan tugas dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 20) Y-P20 = Melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 21) Y-P21 = Saling menghormati kewajiban, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak dari masing-masing bagian.
- 22) Y-P22 = Memberikan perlakuan yang setara kepada para pemangku kepentingan.
- 23) Y-P23 = Memberikan perlakuan yang wajar kepada para pemangku kepentingan.
- 24) Y-P24 = Memberikan hak para pemangku kepentingan sesuai kepentingan masing-masing.
- 25) Y-P25 = Memberikan sanksi/*punishment* kepada para pemangku kepentingan yang melanggar dan penghargaan/*reward* kepada para pemangku kepentingan yang berprestasi

Hasil tanggapan variabel tata kelola keuangan dapat dijelaskan pada tabel 4.8 :

**Tabel 4.8 Tanggapan Mengenai Tata Kelola Keuangan**

No	Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Total	
		f	%	f	%	f	%	F	%	F	%	F	%
1	Y-P1	9	25	16	44,4	11	30,6	-	-	-	-	36	100
2	Y-P2	10	27,8	18	50	8	22,2	-	-	-	-	36	100
3	Y-P3	10	27,8	18	50	8	22,2	-	-	-	-	36	100
4	Y-P4	15	41,7	19	52,8	2	5,6	-	-	-	-	36	100
5	Y-P5	9	25	26	72,2	1	2,8	-	-	-	-	36	100
6	Y-P6	16	44,4	17	47,2	3	8,3	-	-	-	-	36	100
7	Y-P7	23	63,9	13	36,1	-	-	-	-	-	-	36	100
8	Y-P8	15	41,7	19	52,8	2	5,6	-	-	-	-	36	100
9	Y-P9	15	41,7	20	55,6	1	2,8	-	-	-	-	36	100
10	Y-P10	11	30,6	14	38,9	11	30,6	-	-	-	-	36	100
11	Y-P11	9	25	23	63,9	4	11,1	-	-	-	-	36	100
12	Y-P12	5	13,9	14	38,9	17	47,2	-	-	-	-	36	100
13	Y-P13	7	19,4	19	52,8	10	27,8	-	-	-	-	36	100
14	Y-P14	8	22,2	20	55,6	8	22,2	-	-	-	-	36	100
15	Y-P15	23	63,9	13	36,1	-	-	-	-	-	-	36	100
16	Y-P16	9	25	23	63,9	4	11,1	-	-	-	-	36	100
17	Y-P17	15	41,7	19	52,8	2	5,6	-	-	-	-	36	100
18	Y-P18	9	25	26	72,2	1	2,8	-	-	-	-	36	100
19	Y-P19	15	41,7	21	58,3	-	-	-	-	-	-	36	100
20	Y-P20	16	44,4	15	41,7	5	13,9	-	-	-	-	36	100
21	Y-P21	8	22,2	17	47,2	11	30,6	-	-	-	-	36	100
22	Y-P22	6	16,7	21	58,3	9	25	-	-	-	-	36	100
23	Y-P23	8	22,2	17	47,2	11	30,6	-	-	-	-	36	100
24	Y-P24	16	44,4	17	47,2	3	8,3	-	-	-	-	36	100
25	Y-P25	8	22,2	18	50	10	27,8	-	-	-	-	36	100
TOTAL		295	32,8	463	51,4	142	15,8	-	-	-	-	900	100

Sumber: Data olahan 2018

Hasil tanggapan variabel tunjangan kinerja dapat dijelaskan pada tabel 4.8. Tanggapan responden sebagaimana di tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada pernyataan pertama, dengan nilai frekuensi sebesar 16 poin dan nilai frekuensi sebesar 44,4 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya penyediaan informasi keuangan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan cepat, akurat, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan

sesuai dengan haknya. Pernyataan kedua, dengan nilai frekuensi sebesar 18 poin dan nilai frekuensi sebesar 50 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya pengungkapan informasi keuangan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi.

Pernyataan ketiga, dengan nilai frekuensi sebesar 18 poin dan nilai frekuensi sebesar 50 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya pengungkapan informasi keuangan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kepentingan BPJS Ketenagakerjaan. Pernyataan keempat, dengan nilai frekuensi sebesar 17 poin dan nilai frekuensi sebesar 47,2 persen responden menunjukkan respon sangat setuju bahwasanya pengungkapan informasi keuangan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kebutuhan pihak yang berkepentingan.

Pernyataan kelima, dengan nilai frekuensi sebesar 26 poin dan nilai frekuensi sebesar 72,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya Kerahasiaan informasi keuangan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan keenam, dengan nilai frekuensi sebesar 17 poin dan nilai frekuensi sebesar 47,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya rincian tugas dan tanggung jawab bidang kerja dibuat secara jelas dan selaras dengan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan.

Pernyataan ketujuh, dengan nilai frekuensi sebesar 23 poin dan nilai frekuensi sebesar 63,9 persen responden menunjukkan respon sangat setuju bahwasanya Rincian tugas dan tanggung jawab setiap bidang kerja dibuat secara jelas dan selaras dengan sasaran usaha dan strategi BPJS Ketenagakerjaan. Pernyataan kedelapan, dengan nilai frekuensi sebesar 19 poin dan nilai frekuensi sebesar 52,8 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pernyataan kesembilan, dengan nilai frekuensi sebesar 20 poin dan nilai frekuensi sebesar 55,6 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap bidang kerja telah berpegang pada peraturan dan kode etik. Pernyataan kesepuluh, dengan nilai frekuensi sebesar 14

poin dan nilai frekuensi sebesar 38,9 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas setiap bidang kerja dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.

Pernyataan kesebelas, dengan nilai frekuensi sebesar 23 poin dan nilai frekuensi sebesar 63,9 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya penyajian keuangan BPJS Ketenagakerjaan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan kedua belas, dengan nilai frekuensi sebesar 20 poin dan nilai frekuensi sebesar 55,6 persen responden menunjukkan respon netral bahwasanya penyajian laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan mengikuti prosedur pelaporan keuangan sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ketiga belas, dengan nilai frekuensi sebesar 19 poin dan nilai frekuensi sebesar 52,8 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya penyajian keuangan BPJS Ketenagakerjaan berpegang pada prinsip kepatuhan, audit intern dan ekstern diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan keempat belas, dengan nilai frekuensi sebesar 20 poin dan nilai frekuensi sebesar 55,6 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas risiko usaha yang terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan kelima belas, dengan nilai frekuensi sebesar 23 poin dan nilai frekuensi sebesar 63,9 persen responden menunjukkan respon sangat setuju bahwasanya pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dibuat dengan perencanaan dan pelaksanaan yang memadai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pernyataan keenam belas, dengan nilai frekuensi sebesar 23 poin dan nilai frekuensi sebesar 63,9 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya tidak ada dominasi oleh pihak manapun dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat dilakukan secara obyektif.

Pernyataan ketujuh belas, dengan nilai frekuensi sebesar 19 poin dan nilai frekuensi sebesar 52,8 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya pengambilan keputusan BPJS Ketenagakerjaan tidak terpengaruh oleh

kepentingan tertentu sehingga dapat dilakukan secara obyektif. Pernyataan kedelapan belas, dengan nilai frekuensi sebesar 26 poin dan nilai frekuensi sebesar 72,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya pengambilan keputusan BPJS Ketenagakerjaan bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga dilakukan secara obyektif.

Pernyataan kesembilan belas, dengan nilai frekuensi sebesar 21 poin dan nilai frekuensi sebesar 58,3 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan kedua puluh, dengan nilai frekuensi sebesar 16 poin dan nilai frekuensi sebesar 44,4 persen responden menunjukkan respon sangat setuju bahwasanya melaksanakan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan kedua puluh satu, dengan nilai frekuensi sebesar 17 poin dan nilai frekuensi sebesar 47,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya seluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan saling menghormati kewajiban, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak dari masing-masing bagian. Pernyataan kedua puluh dua, dengan nilai frekuensi sebesar 21 poin dan nilai frekuensi sebesar 58,3 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlakuan yang setara kepada para pemangku kepentingan.

Pernyataan kedua puluh tiga, dengan nilai frekuensi sebesar 17 poin dan nilai frekuensi sebesar 47,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlakuan yang wajar kepada para pemangku kepentingan. Pernyataan kedua puluh empat, dengan nilai frekuensi sebesar 17 poin dan nilai frekuensi sebesar 47,2 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak para pemangku kepentingan sesuai kepentingan masing-masing.

Pernyataan kedua puluh lima, dengan nilai frekuensi sebesar 18 poin dan nilai frekuensi sebesar 50 persen responden menunjukkan respon setuju bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sanksi/*punishment* kepada para

pemangku kepentingan yang melanggar dan penghargaan/*reward* kepada para pemangku kepentingan yang berprestasi.

#### 4. Hasil Analisis Data

##### a. Analisis Deskriptif

##### 1) Uji Statistik Deskriptif

Deskriptif variabel dari 36 responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.9 Uji Variabel Deskriptif Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Tata Kelola Keuangan**

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	36	37,00	88,00	125,00	3752	104,2222	8,47892
Tata Kelola Keuangan	36	35,00	90,00	125,00	3748	104,1111	8,17235
Valid N (listwise)	36						

*Sumber : Data Olahan 2015*

Tabel 4.9 menunjukkan statistik dari variabel penelitian Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap penerapan sistem informasi akuntansi menunjukkan nilai minimum sebesar 88, nilai maksimum sebesar 125, mean (rata-rata) sebesar 104,2 dengan standar deviasi sebesar 8,47892.

Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel tata kelola keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 90, nilai maksimum sebesar 125 mean (rata-rata) sebesar 104,1 dengan standar deviasi sebesar 8,17235.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kedua variabel memiliki nilai yang sama, pada variabel penerapan sistem informasi akuntansi yaitu 104,2. Sedangkan variabel tata kelola keuangan yaitu 104,1. Untuk standar deviasi juga memiliki nilai yang tidak jauh berbeda pada variabel

penerapan sistem informasi akuntansi yaitu 8,47892 dan tata kelola keuangan yaitu 8,17235.

## 2) Uji hipotesis deskriptif

- a) Untuk mengetahui apakah penerapan sistem informasi akuntansi di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara telah berfungsi dengan baik atau tidak.

Berdasarkan tabel 4.6, sesuai dengan tahapan pengujian, maka ditemukan:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{total skor setuju dan sangat setuju}}{\text{total skor}} \times 100$$

$$\text{Persentase} = \frac{(502 + 276)}{900} \times 100 = \frac{778}{900} \times 100 = 86,4444$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara telah berfungsi dengan baik, dengan persentase sebesar 86,44 % yaitu diantara 76%-100% (berdasarkan Tabel 3.3 Klasifikasi Champion penerapan akuntansi).

- b) Untuk mengetahui apakah tata kelola keuangan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara telah berfungsi dengan baik atau tidak.

Berdasarkan tabel 4.7, sesuai dengan tahapan pengujian, maka ditemukan:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{total skor setuju dan sangat setuju}}{\text{total skor}} \times 100$$

$$\text{Persentase} = \frac{(463 + 295)}{900} \times 100 = \frac{758}{900} \times 100 = 84,2222$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara telah berfungsi dengan baik, dengan persentase sebesar 84,22% yaitu diantara 76%-100% (berdasarkan Tabel 3.4 Klasifikasi Champion tata kelola keuangan).

## b. Hasil Uji Kualitas Data

### 1) Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Berikut adalah kriteria pengukuran validitas.

- a) Jika  $r_{hitung}$  positif dan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka butir pertanyaan tersebut valid pada signifikansi 0,05 (5%).
- b) Jika  $r_{hitung}$  negatif dan  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- c)  $r_{hitung}$  dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation*. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X)**

Pernyataan	<i>Corrected-item Total Correlation</i> ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Keterangan
X1	0,629	0,3291	Valid
X2	0,447	0,3291	Valid
X3	0,648	0,3291	Valid
X4	0,551	0,3291	Valid
X5	0,429	0,3291	Valid
X6	0,342	0,3291	Valid
X7	0,772	0,3291	Valid
X8	0,545	0,3291	Valid
X9	0,772	0,3291	Valid
X10	0,629	0,3291	Valid
X11	0,772	0,3291	Valid
X12	0,545	0,3291	Valid
X13	0,429	0,3291	Valid
X14	0,409	0,3291	Valid
X15	0,629	0,3291	Valid
X16	0,545	0,3291	Valid
X17	0,379	0,3291	Valid
X18	0,409	0,3291	Valid
X19	0,772	0,3291	Valid
X20	0,417	0,3291	Valid
X21	0,522	0,3291	Valid
X22	0,399	0,3291	Valid
X23	0,772	0,3291	Valid
X24	0,512	0,3291	Valid
X25	0,545	0,3291	Valid

Sumber: Data olahan 2018

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X) seperti yang terlihat pada tabel 4.10 bahwa seluruh pernyataan tersebut memiliki korelasi di atas atau lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang telah ditetapkan



yaitu sebesar 0,3291. Jadi dapat disimpulkan bahwa 25 item pernyataan tersebut dikatakan memenuhi syarat validitas.

**Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Tata Kelola Keuangan (Y)**

Pernyataan	<i>Corrected-item Total Correlation</i>	$r_{\text{tabel}}$	Keterangan
Y1	0,608	0,3291	Valid
Y2	0,527	0,3291	Valid
Y3	0,519	0,3291	Valid
Y4	0,499	0,3291	Valid
Y5	0,535	0,3291	Valid
Y6	0,451	0,3291	Valid
Y7	0,391	0,3291	Valid
Y8	0,499	0,3291	Valid
Y9	0,436	0,3291	Valid
Y10	0,454	0,3291	Valid
Y11	0,433	0,3291	Valid
Y12	0,679	0,3291	Valid
Y13	0,360	0,3291	Valid
Y14	0,620	0,3291	Valid
Y15	0,391	0,3291	Valid
Y16	0,433	0,3291	Valid
Y17	0,499	0,3291	Valid
Y18	0,535	0,3291	Valid
Y19	0,439	0,3291	Valid
Y20	0,679	0,3291	Valid
Y21	0,608	0,3291	Valid
Y22	0,583	0,3291	Valid
Y23	0,608	0,3291	Valid
Y24	0,451	0,3291	Valid
Y25	0,519	0,3291	Valid

*Sumber: Data olahan 2018*

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Tata Kelola Keuangan (Y) seperti yang terlihat pada tabel 4.11 bahwa seluruh pernyataan tersebut memiliki korelasi di atas atau lebih besar  $r_{\text{tabel}}$  yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,3291. Jadi dapat disimpulkan bahwa 25 item pernyataan tersebut dikatakan memenuhi syarat validitas.

## **2) Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih

terhadap pernyataan yang sama menggunakan alat ukur yang sama pula. Besarnya nilai reliabilitas ditunjukkan dengan nilai koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ), dimana suatu instrumen dapat dinyatakan handal (*reliable*) bila  $\alpha > 0,60$ . Di bawah ini disajikan hasil perhitungan uji reliabilitas dalam bentuk tabel masing-masing variabel (Variabel X dan Variabel Y).

**Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel  
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X)**

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	204,5278	272,485	,602	,733
X2	204,2778	276,949	,411	,738
X3	204,5000	272,371	,622	,733
X4	204,0278	276,656	,525	,737
X5	204,0556	279,883	,402	,741
X6	204,4167	280,879	,310	,742
X7	204,5278	270,999	,755	,731
X8	204,0000	278,514	,523	,739
X9	204,5278	270,999	,755	,731
X10	204,5278	272,485	,602	,733
X11	204,5278	270,999	,755	,731
X12	204,0000	278,514	,523	,739
X13	204,0556	279,883	,402	,741
X14	204,3889	281,216	,385	,742
X15	204,5278	272,485	,602	,733
X16	204,0000	278,514	,523	,739
X17	204,4444	279,340	,344	,741
X18	204,3889	281,216	,385	,742
X19	204,5278	270,999	,755	,731
X20	204,0833	280,193	,390	,741
X21	204,0000	278,000	,498	,739
X22	203,9444	280,968	,373	,742
X23	204,5278	270,999	,755	,731
X24	204,0833	276,879	,483	,738
X25	204,0000	278,514	,523	,739
Penerapan sistem Inf. Akuntansi	104,2222	71,892	1,000	,907

*Sumber: Data olahan 2018*

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 20 di atas terlihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari 36 orang responden untuk 25 item pernyataan yang ada dalam variabel penerapan sistem informasi akuntansi masing-masing memiliki tingkat reliabilitas lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebanyak 25 pernyataan dalam variabel penerapan sistem informasi akuntansi tersebut sudah reliabel.

**Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tata Kelola Keuangan (Y)**

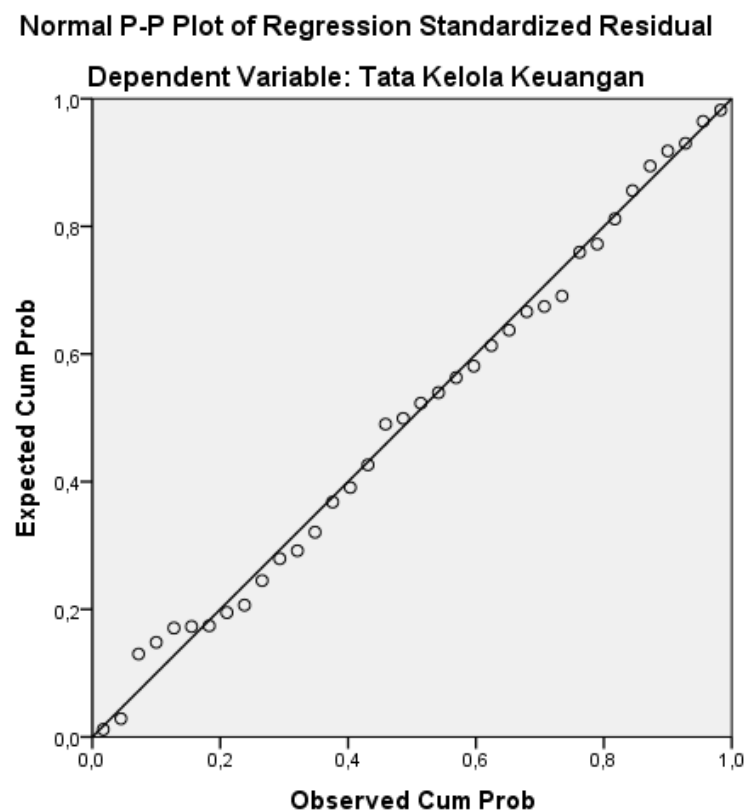
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	204,3056	253,133	,579	,727
Y2	204,1667	255,343	,494	,730
Y3	204,2778	255,521	,486	,730
Y4	203,8611	257,837	,471	,732
Y5	204,0000	258,914	,513	,733
Y6	203,8611	258,123	,419	,733
Y7	203,5833	261,164	,365	,735
Y8	203,8611	257,837	,471	,732
Y9	203,8333	259,629	,408	,734
Y10	204,2222	256,006	,414	,731
Y11	204,0833	259,107	,403	,733
Y12	204,5833	251,621	,654	,725
Y13	204,3056	259,475	,323	,734
Y14	204,2222	253,892	,594	,728
Y15	203,5833	261,164	,365	,735
Y16	204,0833	259,107	,403	,733
Y17	203,8611	257,837	,471	,732
Y18	204,0000	258,914	,513	,733
Y19	203,7778	260,178	,413	,734
Y20	203,9167	251,907	,654	,725
Y21	204,3056	253,133	,579	,727
Y22	204,3056	255,190	,556	,729
Y23	204,3056	253,133	,579	,727
Y24	203,8611	258,123	,419	,733
Y25	204,2778	255,521	,486	,730
Tata Kelola Keuangan	104,1111	66,787	1,000	,882

*Sumber: Data olahan 2018*

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 20 di atas terlihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari 36 orang responden untuk 25 item pernyataan yang ada dalam variabel tata kelola keuangan masing-masing memiliki tingkat reliabilitas lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebanyak 25 pernyataan dalam variabel tata kelola keuangan tersebut sudah reliabel.

### 3) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Tujuan uji normalitas adalah mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.



Sumber: Data olahan 2018

**Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Data**

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa data penelitian memiliki penyebaran dan distribusi yang normal karena berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik normal plot tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai di penelitian ini layak karena memenuhi asumsi normalitas.

## 5. Hasil Uji Hipotesis

### a. Uji $R^2$

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam memvariasi variabel dependen. Dengan menggunakan SPSS 20, diperoleh hasil analisis koefisien determinan ( $R^2$ ) peran penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.14 Hasil Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,851 <sup>a</sup>	,724	,716	4,35877

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

*Sumber: Data olahan 2018*

Diketahui angka R sebesar 0,851 artinya korelasi antara variabel penerapan sistem informasi akuntansi dengan tata kelola keuangan sebesar 0,851. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai R mendekati 1.

Dari pengujian tersebut juga dapat dilihat besarnya R Square 0,724. Hal ini berarti penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan dengan besar pengaruh 0,724 atau 72,4 %. Dengan demikian tinggi rendahnya tata kelola keuangan dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi akuntansi sebesar 72,4% sedangkan sisanya 92,7% dijelaskan faktor lain diluar model.

### b. Uji t

Uji hipotesis dengan Uji t dilakukan dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Untuk menentukan nilai  $t_{tabel}$  ditentukan dengan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan  $df = (n-k)$  atau  $36-2 = 34$  dimana n adalah jumlah

responden dan k adalah jumlah variabel. Jadi  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,032. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

- 1) Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} (n-k)$  maka  $H_0$  diterima
- 2) Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}} (n-k)$  maka  $H_0$  ditolak

**Tabel 4.15 Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18,657	9,085		2,054	,048
1 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	,820	,087	,851	9,436	,000

a. Dependent Variable: Tata Kelola Keuangan

Sumber: Data Olahan 2015

Diketahui  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,032 dan dari pengujian berdasarkan uji t, diperoleh hasil  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  yaitu  $9,436 > 2,032$ . Dilihat dari tingkat signifikansi, nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,48. Hal ini mengartikan bahwa adanya hubungan yang signifikansi antara penerapan sistem informasi akuntansi dan tata kelola keuangan sehingga sudah mendukung hipotesis, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan.

### c. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan menggunakan SPSS 20, diperoleh hasil regresi penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Sederhana****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18,657	9,085		2,054	,048
1 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	,820	,087	,851	9,436	,000

a. Dependent Variable: Tata Kelola Keuangan

*Sumber: Data olahan 2018*

Melalui hasil analisis regresi sederhana yang terdapat pada tabel di atas, maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 18,657 + 0,820X$$

Dari Persamaan di atas maka dapat dijelaskan:

- 1) Konstanta (a) sebesar 18,657 berarti bahwa tata kelola keuangan dapat meningkat sebesar nilai konstantanya meskipun penerapan sistem informasi akuntansi bernilai nol.
- 2) Koefisien X (penerapan sistem informasi akuntansi) bernilai positif sebesar 0,820, hal ini berarti setiap kenaikan satu skor untuk variabel penerapan sistem informasi akuntansi akan diikuti kenaikan tata kelola keuangan sebesar 0,820. Koefisien bernilai positif artinya penerapan sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh yang positif. Semakin tinggi tingkat penerapan sistem informasi akuntansi, maka semakin tinggi juga tingkat tata kelola keuangan.

### **C. Pembahasan**

Dari penelitian yang dilakukan peneliti melalui kuesioner, diperoleh hasil bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara telah melaksanakan penerapan sistem informasi akuntansi yang baik karena sumber daya manusia, peralatan, pengendalian internal dan keamanan data sistem, prosedur, dan data

yang terangkum kedalam kuisisioner variabel penerapan sistem informasi akuntansi yang diuji hipotesis deskriptif, didapatkan total skor setuju dan sangat setuju dibagi dengan total skor keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara telah berfungsi dengan baik, dengan persentase sebesar 86,44% yaitu diantara 76%-100% (berdasarkan Tabel 3.3 Klasifikasi Champion Penerapan Sistem Informasi Akuntansi). Untuk penelitian tata kelola keuangan diperoleh hasil bahwa BPJS ketenagakerjaan cabang medan utara telah memiliki tata kelola keuangan yang baik dalam penerapan *good governance* karena prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness* yang merupakan prinsip *good governance* BPJS Ketenagakerjaan yang terangkum kedalam kuisisioner variabel tata kelola keuangan pada uji hipotesis deskriptif, didapatkan total skor setuju dan sangat setuju dibagi dengan total skor keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara telah berfungsi dengan baik, dengan persentase sebesar 84,22% yaitu diantara 76%-100% (berdasarkan Tabel 3.4 Klasifikasi Champion Tata Kelola Keuangan).

Dari hasil uji model analisis regresi dapat diketahui bahwa pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi memiliki nilai positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan, dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,851 artinya korelasi antara variabel penerapan sistem informasi akuntansi dengan tata kelola keuangan sebesar 0,851. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai R mendekati 1.

Dari pengujian koefisien determinasi juga dapat dilihat besarnya *R Square* 0,724 yang berarti penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan dengan memiliki besar pengaruh 0,724 atau 72,4 %. Dengan demikian tinggi rendahnya tata kelola keuangan dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi akuntansi sebesar 72,4% sedangkan sisanya 27,6% dijelaskan faktor lain diluar model.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui kuesioner, diperoleh hasil penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dimana variabel penerapan sistem



informasi akuntansi memiliki  $t_{hitung} = 9,436$  dan  $t_{tabel}$  ( $\alpha 0,05$  ; df 36) adalah sebesar 2,032. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $9,436 > 2,032$ . Dilihat dari tingkat signifikansi, nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,48 maka  $h_a$  diterima dan  $h_0$  ditolak, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan.

Standar operasional prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Medan utara bidang keuangan menggambarkan keterkaitan antara penerapan sistem informasi akuntansi dengan tata kelola keuangan, hal ini dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan, penerapan sistem informasi akuntansi mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan. Setiap tahap pengelolaan keuangan membutuhkan sistem informasi akuntansi sebagai medianya. Di dalam tata kelola keuangan BPJS Ketenagakerjaan setiap transaksi diolah melalui aplikasi SMILE yang merupakan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi di BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Permata Sari, Dindy and Ilyas, Fitrawati. (2016) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Maulana Yusuf dan Hari Sriwijayanti (2018) yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD yang menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola APBD tentang transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD baik secara parsial maupun simultan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Masalah pertama penelitian ini adalah tentang pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan dalam penerapan *good governance* di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi dengan efektif dan efisien maka dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan dapat dikemukakan saran sebagai bahan pertimbangan antara lain:

##### **1. Bagi Struktural BPJS Ketenagakerjaan**

BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara dapat melakukan sosialisasi mengenai Sistem Informasi Akuntansi kepada seluruh karyawan agar menambah wawasan karyawan mengenai sistem informasi akuntansi. Pengetahuan yang mendalam mengenai sistem informasi akuntansi akan memudahkan BPJS Ketenagakerjaan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien. Sebab sistem informasi akuntansi mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik guna melaksanakan penerapan *good governance*.

##### **2. Bagi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan**

Karyawan BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi guna mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik dalam penerapan *good governance* dan dapat mencegah terjadinya *fraud* ataupun kesalahan material yang besar.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian yang telah dilakukan, misalnya dengan meneliti variabel lain selain dari sistem informasi akuntansi yang memiliki pengaruh terhadap tata kelola keuangan atau menambahkan variabel independen, moderating atau variabel penelitian lainnya. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak obyektif dalam mengisi kuesioner.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya: *Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Abdul, Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke 3. Salemba Empat: Jakarta, 2007.
- Ardianto. *Pengaruh Motivasi, Kekuasaan dan Orientasi Resiko terhadap Keterbukaandan Fleksibilitas Penerapan Standar Akuntansi Penurunan Nilai Aktiva (PSAK No 48)*. 2009.
- Arpiah, Siti. *Ini Empat Masalah IT di BPJS Ketenagakerjaan*. <http://www.beritasatu.com/makro/345549-ini-empat-masalah-it-di-bpjs-ketenagakerjaan.html>, diakses pada 28 Juni 2018, pukul 10.16
- Astuti dan Dharmadiaksa. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Dan Kesesuaian Tugas Pada Kinerja Karyawan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol, No.2, 2014.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2013.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia 2012, Publikasi Tahunan Bank Indonesia*. Jakarta: BI, 2013.
- Baridwan, Zaki. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: YKPN, 2009.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Bodnar, George H dan Hopwood, William S.. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Bodnar, George H. dan Hopwood, William S. *Accounting Information System, terj. Deddy Jacobus*. Jakarta: Indeks, 2003.
- BPJS Ketenagakerjaan. *Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan, 2014.
- BPJS Ketenagakerjaan telah tindak lanjuti temuan BPK, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/6041/BPJS-Ketenagakerjaan-Telah-Tindak-lanjuti-Temuan-BPK>.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. *Sistem Informasi Akuntansi (Perancangan, Proses dan Penerapan)*. Yogyakarta: ANDI, 2011.

- E, Prasojó & T, Kurniawan. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Dipresentasikan dalam The 5th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia. (2008).
- Eko, Raharjo. *Teori Agency dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*, Fokus Ekonomi, Vol. 2 No. 1, 2007
- Fathurrohman, M. *Good Governance* [Online]. Tersedia: <http://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/12/22/good-governance/comment-page-1/>. 2012.
- Ferdinand, Lamak. *Hati-hati jika Hendak Klaim JHT di BPJS Tenaga Kerja*. [https://www.kompasiana.com/ferdilamak/hati-hati-jika-hendak-klaim-jht-di-bpjs-tenaga-kerja\\_563781710f9373eb132e6e23](https://www.kompasiana.com/ferdilamak/hati-hati-jika-hendak-klaim-jht-di-bpjs-tenaga-kerja_563781710f9373eb132e6e23).
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Gilang Fauzi, *BPJS Ketenagakerjaan Bermasalah, Duit Triliunan Menguap*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160114073347-20-04162/bpjs-ketenagakerjaan-bermasalah-duit-triliunan-menguap>.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke 3. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Jamil, Sobrun. *Manajemen dalam perspektif islam*, skripsi, Yogyakarta: 2002.
- Jogiyanto. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Krismiaji. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Kedua*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Cetakan Pertama, 2000.
- Listiani, E. *Pengelolaan Merek dan Reputasi*. Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2009.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat, 2009.

- Ramadhan, Abdul Basith. *Good Governance dalam Islam*.  
<https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/>
- Riahi, Ahmad. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Romney, Marshal B., dan Steinbart, Paul John. *Accounting Information Systems*. USA: Cengage Learning, 2009.
- Sabeni, Arifin. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: BPFE, 2001.
- Saragih, Fitriani. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se-kota Medan*. Jakarta: Konferensi Ilmiah Akuntansi I, 2014).
- Sari, Permata. Dindy dan Ilyas. Fitrawati. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong*, Thesis, 2016.
- Santoso, Singgih. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010.
- Sedarmayanti. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sriwijayanti, Hari. *Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD*, Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, 2018.
- Sudirman, Muh Sajjaj. *Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada PT Bintang Manunggal Abadi*. Makasar: UIN Alauddin Makasara, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sujadijaya, Trimo. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada PT Kreta Api Indonesia (Persero) Kota Bandung)*. Bandung: Skripsi Universitas Pasundan, 2018.

- Suryantara, I Gusti Ngurah. *Merancang Aplikasi Akuntansi dengan VB.NET (Dengan pendekatan prosedural dan berorientasi objek)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Susanto, A.B. *Reputasi dan Good Corporate Governance* [Online]. Tersedia: <http://knkg-indonesia.com/home/news/94-reputasi-a-good-corporate-governance.html>. 2015.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012. *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*.
- Turban, Efraim dan Potter, Richard E. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Usamah, "Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia", Tesis Universitas Diponegoro, 2010.
- Widyaningdyah. Utari, Agnes. Dan Listiyana, Octa Fenny. *Kecendrungan Manajemen Laba Industri Tekstil dan Produk tekstil di Bursa Efek Indonesia yang diprediksi Mengalami Kebangkrutan*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 11, No. 1, 2009.
- Wijayanto, Nugroho. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001.
- Yusniyar. Darwanis dan Abdullah, Syukriy. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh)*. Aceh: Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
JL. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683 – 6622925  
Fax. (061) 6615683 Email : febi@iainsu.ac.id

Nomor : B-1625/EB/PP.009/07/2018

23 Juli 2018

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth,

1. **Drs. Sugianto, MA**

2. **Kamila, SE, M.Si**

Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU  
Medan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : **Nurul Gusmiranda Rajagukguk**

NIM : 51143030

Jurusan : Akuntansi Syariah

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sedang dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:

*"Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan dalam Penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara"*

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. **Drs. Sugianto, MA** untuk menjadi Pembimbing I, dengan tugas utama membimbing isi/materi.
2. **Kamila, SE, M.Si** untuk menjadi Pembimbing II, dengan tugas utama membimbing metodologi.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Wassalam

an-Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**

NIP. 19760423 200312 1 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara



Nomor : B/ 27025/112018

5 November 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Jl. William Iskandar Pasar V  
Medan Estate

Perihal : Izin Riset

Sehubungan surat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B-2661/EB.I/PP.00.9/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya permohonan yang diajukan kepada kami untuk pelaksanaan pengumpulan data / informasi sebagai bahan untuk penulisan skripsi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Utara dapat diterima.
2. Adapun Mahasiswi yang kami setuju untuk melaksanakan pengumpulan data / informasi tersebut adalah :

Nama	NIM	Jurusan
Nurul Gusmiranda Rajagukguk	51143030	Akuntansi Syariah

3. Selanjutnya diminta kepada Mahasiswi yang melaksanakan pengumpulan data / informasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Utara, agar berpakaian rapi dan sopan serta mengikuti peraturan yang berlaku di Instansi kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**BPJS**  
Ketenagakerjaan  
MEDAN UTARA  
Asran Pane  
Kepala Kantor Cabang

JE/AH/HL 03.00

**DATA RESPONDEN**

R/X	SISTEM INFORMASI AKUNTANSI																									TOTAL
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	
1	3	4	4	5	4	4	5	4	5	3	5	4	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	105
2	4	4	4	5	5	2	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	3	4	4	4	5	5	4	5	5	107
3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	5	5	5	4	5	4	106
4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	121
5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	114
6	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	104
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
8	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	114
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125
10	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	88
11	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	109
12	3	5	3	4	5	4	3	4	3	3	3	4	5	4	3	4	4	4	3	5	4	5	3	4	4	96
13	3	5	3	4	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	101
14	3	5	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	3	4	4	93
15	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	92
16	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	95
17	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	103
18	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	105
19	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	104
20	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	4	4	5	5	4	5	4	106
21	5	5	5	5	5	3	4	4	4	5	4	4	5	3	5	4	3	3	4	5	5	4	4	3	4	105



## DATA RESPONDEN

[illegible]

[illegible]

### UJI VALIDITAS VARIABEL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	SIA
Pearson Correlation	1	,662**	,974**	,146	,083	,134	,286	,258	,286	1,000**	,286	,258	,083	,096	1,000**	,258	,058	,096	,286	,078	,163	-,038	,286	,005	,258	,629**
X1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,397	,631	,437	,091	,128	,091	,000	,091	,128	,631	,578	,000	,128	,738	,578	,091	,651	,341	,824	,091	,977	,128	,000
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Pearson Correlation	,662**	1	,669**	-,032	,259	,117	,149	,026	,149	,662**	,149	,026	,259	,054	,662**	,026	,057	,054	,149	,274	-,046	,229	,149	-,131	,026	,447**
X2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,852	,127	,498	,385	,882	,385	,000	,385	,882	,127	,752	,000	,882	,740	,752	,385	,106	,788	,178	,385	,445	,882	,006
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Pearson Correlation	,974**	,669**	1	,188	,057	,135	,359*	,229	,359*	,974**	,359*	,229	,057	,094	,974**	,229	,059	,094	,359*	,053	,207	-,079	,359*	,045	,229	,648**
X3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,273	,743	,433	,031	,179	,031	,000	,031	,179	,743	,587	,000	,179	,732	,587	,031	,758	,226	,648	,031	,794	,179	,000
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Pearson Correlation	,146	-,032	,188	1	,273	,123	,456**	,031	,456**	,146	,456**	,031	,273	,216	,146	,031	,280	,216	,456**	,225	,962**	,233	,456**	,858**	,031	,551**
X4 Sig. (2-tailed)	,397	,852	,273		,107	,474	,005	,856	,005	,397	,005	,856	,107	,206	,397	,856	,098	,206	,005	,186	,000	,171	,005	,000	,856	,000
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Pearson Correlation	,083	,259	,057	,273	1	-,119	,093	,287	,093	,083	,093	,287	1,000**	-,085	,083	,287	,154	-,085	,093	,953**	,259	,718**	,093	,158	,287	,429**
X5 Sig. (2-tailed)	,631	,127	,743	,107		,491	,588	,090	,588	,631	,588	,090	,000	,621	,631	,090	,370	,621	,588	,000	,127	,000	,588	,357	,090	,009
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
X6 Pearson Correlation	,134	,117	,135	,123	-,119	1	,223	-,135	,223	,134	,223	-,135	-,119	,785**	,134	-,135	,486**	,785**	,223	,055	,131	,139	,223	,267	-,135	,342*

	Sig. (2-tailed)	,437	,498	,433	,474	,491		,191	,434	,191	,437	,191	,434	,491	,000	,437	,434	,003	,000	,191	,749	,447	,419	,191	,115	,434	,041
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,286	,149	,359*	,456**	,093	,223	1	,378*	1,000**	,286	1,000**	,378*	,093	,294	,286	,378*	,195	,294	1,000**	,088	,421*	,130	1,000**	,419*	,378*	,772**
X7	Sig. (2-tailed)	,091	,385	,031	,005	,588	,191		,023	,000	,091	,000	,023	,588	,082	,091	,023	,254	,082	,000	,610	,011	,449	,000	,011	,023	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,258	,026	,229	,031	,287	-,135	,378*	1	,378*	,258	,378*	1,000**	,287	,013	,258	1,000**	,084	,013	,378*	,232	-,011	,224	,378*	,108	1,000**	,545**
X8	Sig. (2-tailed)	,128	,882	,179	,856	,090	,434	,023		,023	,128	,023	,000	,090	,939	,128	,000	,627	,939	,023	,173	,948	,190	,023	,529	,000	,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,286	,149	,359*	,456**	,093	,223	1,000**	,378*	1	,286	1,000**	,378*	,093	,294	,286	,378*	,195	,294	1,000**	,088	,421*	,130	1,000**	,419*	,378*	,772**
X9	Sig. (2-tailed)	,091	,385	,031	,005	,588	,191	,000	,023		,091	,000	,023	,588	,082	,091	,023	,254	,082	,000	,610	,011	,449	,000	,011	,023	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	1,000**	,662**	,974**	,146	,083	,134	,286	,258	,286	1	,286	,258	,083	,096	1,000**	,258	,058	,096	,286	,078	,163	-,038	,286	,005	,258	,629**
X10	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,397	,631	,437	,091	,128	,091		,091	,128	,631	,578	,000	,128	,738	,578	,091	,651	,341	,824	,091	,977	,128	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,286	,149	,359*	,456**	,093	,223	1,000**	,378*	1,000**	,286	1	,378*	,093	,294	,286	,378*	,195	,294	1,000**	,088	,421*	,130	1,000**	,419*	,378*	,772**
X11	Sig. (2-tailed)	,091	,385	,031	,005	,588	,191	,000	,023	,000	,091		,023	,588	,082	,091	,023	,254	,082	,000	,610	,011	,449	,000	,011	,023	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
X12	Pearson Correlation	,258	,026	,229	,031	,287	-,135	,378*	1,000**	,378*	,258	,378*	1	,287	,013	,258	1,000**	,084	,013	,378*	,232	-,011	,224	,378*	,108	1,000**	,545**

	Sig. (2-tailed)	,128	,882	,179	,856	,090	,434	,023	,000	,023	,128	,023		,090	,939	,128	,000	,627	,939	,023	,173	,948	,190	,023	,529	,000	,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,083	,259	,057	,273	1,000**	-,119	,093	,287	,093	,083	,093	,287	1	-,085	,083	,287	,154	-,085	,093	,953**	,259	,718**	,093	,158	,287	,429**
X13	Sig. (2-tailed)	,631	,127	,743	,107	,000	,491	,588	,090	,588	,631	,588	,090		,621	,631	,090	,370	,621	,588	,000	,127	,000	,588	,357	,090	,009
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,096	,054	,094	,216	-,085	,785**	,294	,013	,294	,096	,294	,013	-,085	1	,096	,013	,356*	1,000**	,294	-,080	,228	,237	,294	,403*	,013	,409*
X14	Sig. (2-tailed)	,578	,752	,587	,206	,621	,000	,082	,939	,082	,578	,082	,939	,621		,578	,939	,033	,000	,082	,642	,182	,163	,082	,015	,939	,013
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	1,000**	,662**	,974**	,146	,083	,134	,286	,258	,286	1,000**	,286	,258	,083	,096	1	,258	,058	,096	,286	,078	,163	-,038	,286	,005	,258	,629**
X15	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,397	,631	,437	,091	,128	,091	,000	,091	,128	,631	,578		,128	,738	,578	,091	,651	,341	,824	,091	,977	,128	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,258	,026	,229	,031	,287	-,135	,378*	1,000**	,378*	,258	,378*	1,000**	,287	,013	,258	1	,084	,013	,378*	,232	-,011	,224	,378*	,108	1,000**	,545**
X16	Sig. (2-tailed)	,128	,882	,179	,856	,090	,434	,023	,000	,023	,128	,023	,000	,090	,939	,128		,627	,939	,023	,173	,948	,190	,023	,529	,000	,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,058	,057	,059	,280	,154	,486**	,195	,084	,195	,058	,195	,084	,154	,356*	,058	,084	1	,356*	,195	,234	,227	,083	,195	,397*	,084	,379*
X17	Sig. (2-tailed)	,738	,740	,732	,098	,370	,003	,254	,627	,254	,738	,254	,627	,370	,033	,738	,627		,033	,254	,170	,182	,629	,254	,017	,627	,023
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
X18	Pearson Correlation	,096	,054	,094	,216	-,085	,785**	,294	,013	,294	,096	,294	,013	-,085	1,000**	,096	,013	,356*	1	,294	-,080	,228	,237	,294	,403*	,013	,409*



	Sig. (2-tailed)	,578	,752	,587	,206	,621	,000	,082	,939	,082	,578	,082	,939	,621	,000	,578	,939	,033		,082	,642	,182	,163	,082	,015	,939	,013
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,286	,149	,359*	,456**	,093	,223	1,000**	,378*	1,000**	,286	1,000**	,378*	,093	,294	,286	,378*	,195	,294	1	,088	,421*	,130	1,000**	,419*	,378*	,772**
X19	Sig. (2-tailed)	,091	,385	,031	,005	,588	,191	,000	,023	,000	,091	,000	,023	,588	,082	,091	,023	,254	,082		,610	,011	,449	,000	,011	,023	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,078	,274	,053	,225	,953**	,055	,088	,232	,088	,078	,088	,232	,953**	-,080	,078	,232	,234	-,080	,088	1	,210	,675**	,088	,108	,232	,417*
X20	Sig. (2-tailed)	,651	,106	,758	,186	,000	,749	,610	,173	,610	,651	,610	,173	,000	,642	,651	,173	,170	,642	,610		,219	,000	,610	,533	,173	,011
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,163	-,046	,207	,962**	,259	,131	,421*	-,011	,421*	,163	,421*	-,011	,259	,228	,163	-,011	,227	,228	,421*	,210	1	,202	,421*	,819**	-,011	,522**
X21	Sig. (2-tailed)	,341	,788	,226	,000	,127	,447	,011	,948	,011	,341	,011	,948	,127	,182	,341	,948	,182	,182	,011	,219		,237	,011	,000	,948	,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	-,038	,229	-,079	,233	,718**	,139	,130	,224	,130	-,038	,130	,224	,718**	,237	-,038	,224	,083	,237	,130	,675**	,202	1	,130	,308	,224	,399*
X22	Sig. (2-tailed)	,824	,178	,648	,171	,000	,419	,449	,190	,449	,824	,449	,190	,000	,163	,824	,190	,629	,163	,449	,000	,237		,449	,067	,190	,016
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	Pearson Correlation	,286	,149	,359*	,456**	,093	,223	1,000**	,378*	1,000**	,286	1,000**	,378*	,093	,294	,286	,378*	,195	,294	1,000**	,088	,421*	,130	1	,419*	,378*	,772**
X23	Sig. (2-tailed)	,091	,385	,031	,005	,588	,191	,000	,023	,000	,091	,000	,023	,588	,082	,091	,023	,254	,082	,000	,610	,011	,449		,011	,023	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
X24	Pearson Correlation	,005	-,131	,045	,858**	,158	,267	,419*	,108	,419*	,005	,419*	,108	,158	,403*	,005	,108	,397*	,403*	,419*	,108	,819**	,308	,419*	1	,108	,512**

Sig. (2-tailed)	,977	,445	,794	,000	,357	,115	,011	,529	,011	,977	,011	,529	,357	,015	,977	,529	,017	,015	,011	,533	,000	,067	,011		,529	,001
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Pearson Correlation	,258	,026	,229	,031	,287	-,135	,378*	1,000**	,378*	,258	,378*	1,000**	,287	,013	,258	1,000**	,084	,013	,378*	,232	-,011	,224	,378*	,108	1	,545**
X25Sig. (2-tailed)	,128	,882	,179	,856	,090	,434	,023	,000	,023	,128	,023	,000	,090	,939	,128	,000	,627	,939	,023	,173	,948	,190	,023	,529		,001
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Pearson Correlation	,629**	,447**	,648**	,551**	,429**	,342*	,772**	,545**	,772**	,629**	,772**	,545**	,429**	,409*	,629**	,545**	,379*	,409*	,772**	,417*	,522**	,399*	,772**	,512**	,545**	1
SIA Sig. (2-tailed)	,000	,006	,000	,000	,009	,041	,000	,001	,000	,000	,000	,001	,009	,013	,000	,001	,023	,013	,000	,011	,001	,016	,000	,001	,001	
N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## UJI VALIDITAS VARIABEL TATA KELOLA KEUANGAN

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	Y21	Y22	Y23	Y24	Y25	TKK
Y1	Pearson Correlation	1	.446"	.155	.071	.134	.005	.154	.071	.083	.295	.225	.481"	.324	.462"	.154	.225	.071	.134	.258	.105	1,000"	.286	1,000"	.005	.155	.608"
	Sig. (2-tailed)		.006	.368	.679	.435	.977	.371	.679	.631	.080	.187	.003	.054	.005	.371	.187	.679	.435	.128	.541	.000	.091	.000	.977	.368	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y2	Pearson Correlation	.446"	1	.118	.086	.458"	.080	.223	.086	-.057	.050	.183	.371	.010	.946"	.223	.183	.086	.458"	.009	.416	.446"	.133	.446"	.080	.118	.527"
	Sig. (2-tailed)	.006		.493	.617	.005	.643	.190	.617	.743	.770	.284	.026	.956	.000	.190	.284	.617	.005	.959	.012	.006	.438	.006	.643	.493	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y3	Pearson Correlation	.155	.118	1	.049	.284	.170	.351	.049	.493"	.151	.019	.402	-.010	.118	.351	.019	.049	.284	.467"	.485"	.155	.174	.155	.170	1,000"	.519"
	Sig. (2-tailed)	.368	.493		.778	.093	.321	.036	.778	.002	.379	.914	.015	.956	.492	.036	.914	.778	.093	.004	.003	.368	.309	.368	.321	.000	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y4	Pearson Correlation	.071	.086	.049	1	.210	.174	.069	1,000"	.346"	.486"	.016	.180	.354	.214	.069	.016	1,000"	.210	-.074	.206	.071	.452"	.071	.174	.049	.499"
	Sig. (2-tailed)	.679	.617	.778		.219	.311	.691	.000	.039	.003	.927	.295	.034	.211	.691	.927	.000	.219	.666	.229	.679	.006	.679	.311	.778	.002
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y5	Pearson Correlation	.134	.458"	.284	.210	1	.195	.350	.210	.203	-.074	.188	.072	-.199	.523"	.350	.188	.210	1,000"	.520"	.544"	.134	.333	.134	.195	.284	.535"
	Sig. (2-tailed)	.435	.005	.093	.219		.255	.037	.219	.236	.666	.273	.675	.245	.001	.037	.273	.219	.000	.001	.001	.435	.047	.435	.255	.093	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y6	Pearson Correlation	.005	.080	.170	.174	.195	1	.064	.174	.158	.113	.241	.290	.264	.132	.064	.241	.174	.195	.108	.379	.005	.419	.005	1,000"	.170	.451"
	Sig. (2-tailed)	.977	.643	.321	.311	.255		.712	.311	.357	.513	.157	.086	.120	.442	.712	.157	.311	.255	.529	.022	.977	.011	.977	.000	.321	.006
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y7	Pearson Correlation	.154	.223	.351	.069	.350	.064	1	.069	.113	-.222	-.019	.106	-.092	.260	1,000"	-.019	.069	.350	.440"	.411	.154	.173	.154	.064	.351	.391
	Sig. (2-tailed)	.371	.190	.036	.691	.037	.712		.691	.513	.193	.911	.539	.594	.125	.000	.911	.691	.037	.007	.013	.371	.312	.371	.712	.036	.018
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Y8	Pearson Correlation	,071	,086	,049	1,000"	,210	,174	,069	1	,346"	,486"	,016	,180	,354"	,214	,069	,016	1,000"	,210	-,074	,206	,071	,452"	,071	,174	,049	,499"	
	Sig. (2-tailed)	,679	,617	,778	,000	,219	,311	,691		,039	,003	,927	,295	,034	,211	,691	,927	,000	,219	,666	,229	,679	,006	,679	,311	,778	,002	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Y9	Pearson Correlation	,083	-,057	,493"	,346"	,203	,158	,113	,346"	1	,262	,093	,148	,163	,000	,113	,093	,346"	,203	,287	,419"	,083	,093	,083	,158	,493"	,436"	
	Sig. (2-tailed)	,631	,743	,002	,039	,236	,357	,513	,039		,122	,591	,389	,342	1,000	,513	,591	,039	,236	,090	,011	,631	,588	,631	,357	,002	,008	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Y10	Pearson Correlation	,295	,050	,151	,486"	-,074	,113	-,222	,486"	,262	1	,304	,598"	,365"	,107	-,222	,304	,486"	-,074	-,143	,102	,295	,056	,295	,113	,151	,454"	
	Sig. (2-tailed)	,080	,770	,379	,003	,666	,513	,193	,003	,122		,072	,000	,029	,536	,193	,072	,003	,666	,405	,556	,080	,748	,080	,513	,379	,005	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Y11	Pearson Correlation	,225	,183	,019	,016	,188	,241	-,019	,016	,093	,304	1	,453"	,029	,214	-,019	1,000"	,016	,188	,074	,371"	,225	,179	,225	,241	,019	,433"	
	Sig. (2-tailed)	,187	,284	,914	,927	,273	,157	,911	,927	,591	,072		,005	,867	,211	,911	,000	,927	,273	,666	,026	,187	,295	,187	,157	,914	,008	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Y12	Pearson Correlation	,481"	,371"	,402"	,180	,072	,290	,106	,180	,148	,598"	,453"	1	,281	,409"	,106	,453"	,180	,072	,139	,332"	,481"	,299	,481"	,290	,402"	,679"	
	Sig. (2-tailed)	,003	,026	,015	,295	,675	,086	,539	,295	,389	,000	,005		,097	,013	,539	,005	,295	,675	,418	,048	,003	,076	,003	,086	,015	,000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Y13	Pearson Correlation	,324	,010	-,010	,354"	-,199	,264	-,092	,354"	,163	,365"	,029	,281	1	,061	-,092	,029	,354"	-,199	,027	,053	,324	,239	,324	,264	-,010	,360"	
	Sig. (2-tailed)	,054	,956	,956	,034	,245	,120	,594	,034	,342	,029	,867	,097		,723	,594	,867	,034	,245	,874	,757	,054	,161	,054	,120	,956	,031	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Y14	Pearson Correlation	,462"	,946"		,118	,214	,523"	,132	,260	,214	,000	,107	,214	,409"	,061	1	,260	,214	,214	,523"	,084	,476"	,462"	,260	,462"	,132	,118	,620"
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,492	,211	,001	,442	,125	,211	1,000	,536	,211	,013	,723		,125	,211	,211	,001	,627	,003	,005	,125	,005	,442	,492	,000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Y15	Pearson Correlation	,154	,223	,351"	,069	,350"	,064	1,000"	,069	,113	-,222	-,019	,106	-,092	,260	1	-,019	,069	,350"	,440"	,411"	,154	,173	,154	,064	,351"	,391"	
	Sig. (2-tailed)	,371	,190	,036	,691	,037	,712	,000	,691	,513	,193	,911	,539	,594	,125		,911	,691	,037	,007	,013	,371	,312	,371	,712	,036	,018	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Y16	Pearson Correlation	,225	,183	,019	,016	,188	,241	-,019	,016	,093	,304	1,000"	,453"	,029	,214	-,019	1	,016	,188	,074	,371"	,225	,179	,225	,241	,019	,433"
	Sig. (2-tailed)	,187	,284	,914	,927	,273	,157	,911	,927	,591	,072	,000	,005	,867	,211	,911		,927	,273	,666	,026	,187	,295	,187	,157	,914	,008
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y17	Pearson Correlation	,071	,086	,049	1,000"	,210	,174	,069	1,000"	,346"	,486"	,016	,180	,354"	,214	,069	,016	1	,210	-,074	,206	,071	,452"	,071	,174	,049	,499"
	Sig. (2-tailed)	,679	,617	,778	,000	,219	,311	,691	,000	,039	,003	,927	,295	,034	,211	,691	,927		,219	,666	,229	,679	,006	,679	,311	,778	,002
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y18	Pearson Correlation	,134	,458"	,284	,210	1,000"	,195	,350"	,210	,203	-,074	,188	,072	-,199	,523"	,350"	,188	,210	1	,520"	,544"	,134	,333"	,134	,195	,284	,535"
	Sig. (2-tailed)	,435	,005	,093	,219	,000	,255	,037	,219	,236	,666	,273	,675	,245	,001	,037	,273	,219		,001	,001	,435	,047	,435	,255	,093	,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y19	Pearson Correlation	,258	,009	,467"	-,074	,520"	,108	,440"	-,074	,287	-,143	,074	,139	,027	,084	,440"	,074	-,074	,520"	1	,488"	,258	,378"	,258	,108	,467"	,439"
	Sig. (2-tailed)	,128	,959	,004	,666	,001	,529	,007	,666	,090	,405	,666	,418	,874	,627	,007	,666	,666	,001		,003	,128	,023	,128	,529	,004	,007
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y20	Pearson Correlation	,105	,416"	,485"	,206	,544"	,379"	,411"	,206	,419"	,102	,371"	,332"	,053	,476"	,411"	,371"	,206	,544"	,488"	1	,105	,367"	,105	,379"	,485"	,679"
	Sig. (2-tailed)	,541	,012	,003	,229	,001	,022	,013	,229	,011	,556	,026	,048	,757	,003	,013	,026	,229	,001	,003		,541	,028	,541	,022	,003	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y21	Pearson Correlation	1,000"	,446"	,155	,071	,134	,005	,154	,071	,083	,295	,225	,481"	,324	,462"	,154	,225	,071	,134	,258	,105	1	,286	1,000"	,005	,155	,608"
	Sig. (2-tailed)	,000	,006	,368	,679	,435	,977	,371	,679	,631	,080	,187	,003	,054	,005	,371	,187	,679	,435	,128	,541		,091	,000	,977	,368	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y22	Pearson Correlation	,286	,133	,174	,452"	,333"	,419"	,173	,452"	,093	,056	,179	,299	,239	,260	,173	,179	,452"	,333"	,378"	,367"	,286	1	,286	,419"	,174	,583"
	Sig. (2-tailed)	,091	,438	,309	,006	,047	,011	,312	,006	,588	,748	,295	,076	,161	,125	,312	,295	,006	,047	,023	,028	,091		,091	,011	,309	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Y23	Pearson Correlation	1,000"	,446"	,155	,071	,134	,005	,154	,071	,083	,295	,225	,481"	,324	,462"	,154	,225	,071	,134	,258	,105	1,000"	,286	1	,005	,155	,608"
	Sig. (2-tailed)	,000	,006	,368	,679	,435	,977	,371	,679	,631	,080	,187	,003	,054	,005	,371	,187	,679	,435	,128	,541	,000	,091		,977	,368	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

	Pearson Correlation	,005	,080	,170	,174	,195	1,000**	,064	,174	,158	,113	,241	,290	,264	,132	,064	,241	,174	,195	,108	,379*	,005	,419*	,005	1	,170	,451**
Y24	Sig. (2-tailed)	,977	,643	,321	,311	,255	,000	,712	,311	,357	,513	,157	,086	,120	,442	,712	,157	,311	,255	,529	,022	,977	,011	,977		,321	,006
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Pearson Correlation	,155	,118	1,000**	,049	,284	,170	,351*	,049	,493**	,151	,019	,402*	-,010	,118	,351*	,019	,049	,284	,467**	,485**	,155	,174	,155	,170	1	,519**
Y25	Sig. (2-tailed)	,368	,493	,000	,778	,093	,321	,036	,778	,002	,379	,914	,015	,956	,492	,036	,914	,778	,093	,004	,003	,368	,309	,368	,321		,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Pearson Correlation	,608**	,527**	,519**	,499**	,535**	,451**	,391*	,499**	,436**	,454**	,433**	,679**	,360*	,620**	,391*	,433**	,499**	,535**	,439**	,679**	,608**	,583**	,608**	,451**	,519**	1
TKK	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,001	,002	,001	,006	,018	,002	,008	,005	,008	,000	,031	,000	,018	,008	,002	,001	,007	,000	,000	,000	,000	,006	,001	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## UJI RELIABILITAS VARIABEL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	36	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,746	,918	26

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	204,5278	272,485	,602	.	,733
X2	204,2778	276,949	,411	.	,738
X3	204,5000	272,371	,622	.	,733
X4	204,0278	276,656	,525	.	,737
X5	204,0556	279,883	,402	.	,741
X6	204,4167	280,879	,310	.	,742
X7	204,5278	270,999	,755	.	,731
X8	204,0000	278,514	,523	.	,739
X9	204,5278	270,999	,755	.	,731
X10	204,5278	272,485	,602	.	,733
X11	204,5278	270,999	,755	.	,731
X12	204,0000	278,514	,523	.	,739
X13	204,0556	279,883	,402	.	,741
X14	204,3889	281,216	,385	.	,742
X15	204,5278	272,485	,602	.	,733
X16	204,0000	278,514	,523	.	,739

X17	204,4444	279,340	,344	.	,741
X18	204,3889	281,216	,385	.	,742
X19	204,5278	270,999	,755	.	,731
X20	204,0833	280,193	,390	.	,741
X21	204,0000	278,000	,498	.	,739
X22	203,9444	280,968	,373	.	,742
X23	204,5278	270,999	,755	.	,731
X24	204,0833	276,879	,483	.	,738
X25	204,0000	278,514	,523	.	,739
SIA	104,2222	71,892	1,000	.	,907



## UJI RELIABILITAS VARIABEL TATA KELOLA KEUANGAN

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	36	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	36	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,740	,898	26

**Item-Total Statistics**

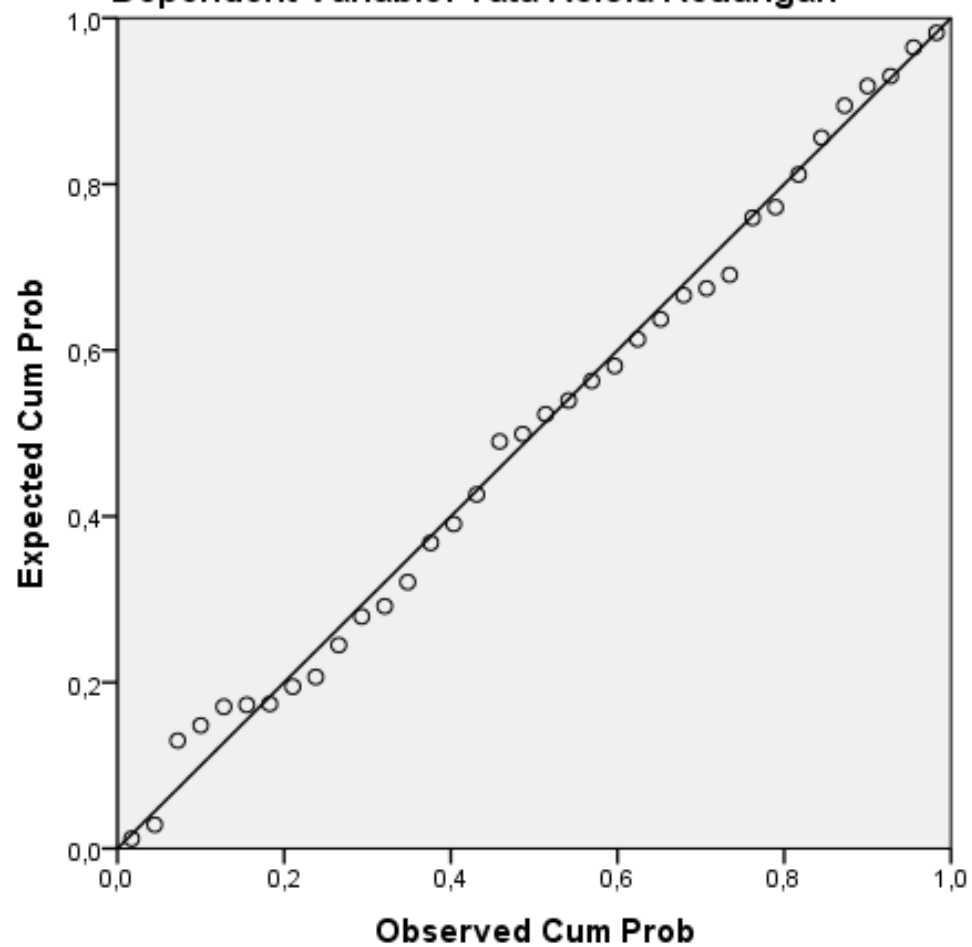
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	204,3056	253,133	,579	.	,727
Y2	204,1667	255,343	,494	.	,730
Y3	204,2778	255,521	,486	.	,730
Y4	203,8611	257,837	,471	.	,732
Y5	204,0000	258,914	,513	.	,733
Y6	203,8611	258,123	,419	.	,733
Y7	203,5833	261,164	,365	.	,735
Y8	203,8611	257,837	,471	.	,732
Y9	203,8333	259,629	,408	.	,734
Y10	204,2222	256,006	,414	.	,731
Y11	204,0833	259,107	,403	.	,733
Y12	204,5833	251,621	,654	.	,725
Y13	204,3056	259,475	,323	.	,734
Y14	204,2222	253,892	,594	.	,728
Y15	203,5833	261,164	,365	.	,735
Y16	204,0833	259,107	,403	.	,733

Y17	203,8611	257,837	,471	.	,732
Y18	204,0000	258,914	,513	.	,733
Y19	203,7778	260,178	,413	.	,734
Y20	203,9167	251,907	,654	.	,725
Y21	204,3056	253,133	,579	.	,727
Y22	204,3056	255,190	,556	.	,729
Y23	204,3056	253,133	,579	.	,727
Y24	203,8611	258,123	,419	.	,733
Y25	204,2778	255,521	,486	.	,730
TKK	104,1111	66,787	1,000	.	,882

## UJI NORMALITAS

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Tata Kelola Keuangan



## UJI ANALISIS REGRESI SEDERHANA

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,851 <sup>a</sup>	,724	,716	4,35877

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Akuntansi

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1691,594	1	1691,594	89,037	,000 <sup>b</sup>
Residual	645,961	34	18,999		
Total	2337,556	35			

a. Dependent Variable: Tata Kelola Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Akuntansi

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18,657	9,085		2,054	,048
Sistem Informasi Akuntansi	,820	,087	,851	9,436	,000

a. Dependent Variable: Tata Kelola Keuangan

**Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Sistem Informasi Akuntansi	36	37,00	88,00	125,00	3752	104,2222	8,47892	71,892
Tata Kelola Keuangan	36	35,00	90,00	125,00	3748	104,1111	8,17235	66,787
Valid N (listwise)	36							

## **KUESIONER PENELITIAN**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TATA  
KELOLA KEUANGAN DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI  
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA**



**Peneliti:**

**Nurul Gusmiranda Rajagukguk**

**(Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)**

**NIM : 51143030**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

KUESIONER PENELITIAN  
**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TATA  
 KELOLA KEUANGAN DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE  
 DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN UTARA**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

---

Kepada Yth:  
 Bapak / Ibu Responden  
 di-  
 tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi demi memperoleh gelar sarjana akuntansi syariah (S.Akun) jurusan akuntansi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Maka dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk tanggapan terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dalam kuesioner ini mengenai topic “**Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Tata Kelola Keuangan dalam Penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara**”. Adapun pengumpulan data dari kuesioner ini semata-mata hanya digunakan untuk keperluan akademis dan penelitian guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semua data dalam kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti.

Kesediaan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan dalam bentuk informasi yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan penelitian ini. Selain itu, jawaban yang Bapak/Ibu berikan juga merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi penulis.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Medan,    Oktober 2018

Hormat Saya

Penulis

#### A. Data Identitas Responden

1. No. responden : .....(Diisi oleh peneliti)
2. Nama (boleh tidak diisi) : .....
3. Jenis Kelamin : ☐ laki laki ☐ perempuan
4. Usia : ☐ <25 Tahun ☐ 25-35 Tahun  
☐ 6-45 Tahun ☐ 46-55 Tahun  
☐ >56 Tahun
5. Pendidikan Terakhir : ☐ SMU ☐ D-3  
☐ S-1 ☐ S-2  
☐ S-3
6. Jabatan : ☐ Struktural  
☐ Staf / Karyawan
7. Lama Bekerja : ☐ <1 Tahun ☐ 1-5 Tahun  
☐ 5-10 Tahun ☐ 11-15 Tahun  
☐ 16-20 Tahun ☐ 21-25 Tahun  
☐ 26-30 Tahun ☐ >31 Tahun

#### B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Adapun petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Kepada Bapak/Ibu diharapkan untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya.
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternatif jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini.
4. Terdapat 5 (lima) alternatif jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut :

Simbol	Kategori	Bobot Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

## I. TATA KELOLA KEUANGAN

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
<b>Transparency</b>						
1	Penyediaan informasi keuangan dilakukan dengan cepat, akurat, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.					
2	Pengungkapan informasi keuangan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi.					
3	Pengungkapan informasi keuangan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kepentingan BPJS Ketenagakerjaan.					
4	Pengungkapan informasi keuangan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kebutuhan pihak yang berkepentingan.					
5	Kerahasiaan informasi keuangan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
<b>Accountability</b>						
6	Rincian tugas dan tanggung jawab bidang kerja dibuat secara jelas dan selaras dengan visi dan misi badan.					
7	Rincian tugas dan tanggung jawab bidang kerja dibuat secara jelas dan selaras dengan sasaran usaha dan strategi badan.					
8	Sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan.					



No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
9	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah berpegang pada peraturan dan kode etik.					
10	Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.					
<b>Responsibility</b>						
11	Penyajian keuangan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
12	Penyajian laporan keuangan mengikuti prosedur pelaporan keuangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.					
13	Penyajian keuangan berpegang pada prinsip kepatuhan, audit intern dan ekstern diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
14	Bertanggung jawab atas risiko usaha yang terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
15	Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dibuat dengan perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.					
<b>Independency</b>						
16	Tidak adanya dominasi oleh pihak manapun dalam pengambilan keputusan sehingga dapat dilakukan secara obyektif.					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
17	Tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.					
18	Bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan dilakukan secara obyektif.					
19	Pelaksanaan fungsi dan tugas dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
20	Melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
21	Salang menghormati kewajiban, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak dari masing-masing bagian.					
<b><i>Fairness</i></b>						
22	Memberikan perlakuan yang setara kepada para pemangku kepentingan					
23	Memberikan perlakuan yang wajar kepada para pemangku kepentingan					
24	Memberikan hak para pemangku kepentingan sesuai kepentingan masing-masing					
25	Memberikan sanksi/ <i>punishment</i> kepada para pemangku kepentingan yang melanggar dan penghargaan/ <i>reward</i> kepada para pemangku kepentingan yang berprestasi					

## II. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Sumber Daya Manusia						
1.	Karyawan ditempatkan pada bidang kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan karyawan.					
2.	Perusahaan memberikan pelatihan untuk meningkatkan <i>skill</i> , keterampilan dan <i>knowledge</i> karyawan (SDM).					
3.	Perusahaan memberikan bimbingan teknis untuk menggali dan meningkatkan kompetensi karyawan.					
4.	Perusahaan memberikan bimbingan teknis secara kontinuitas kepada karyawan untuk terus meningkatkan kompetensi karyawan.					
5.	Karyawan memiliki pengalaman kerja yang memadai dalam posisi/bidang kerja yang diduduki.					
6.	Karyawan mempunyai wawasan yang luas mengenai Sistem Informasi Akuntansi perusahaan					
Peralatan						
7.	Peralatan sistem informasi akuntansi yang disediakan perusahaan sudah lengkap seperti software, hardware dan jaringan internet.					
8.	Perusahaan menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk memudahkan pekerjaan.					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
9.	Seluruh peralatan sistem informasi akuntansi seperti software, hardware dan jaringan internet. yang disediakan perusahaan masih layak digunakan.					
10.	Pengguna sistem informasi akuntansi mampu mengoperasikan peralatan sistem informasi akuntansi dengan baik dan benar.					
<b>Pengendalian Internal dan Keamanan Data Sistem</b>						
11.	Sistem operasi yang digunakan mendukung proses sistem informasi akuntansi berbasis komputer perusahaan.					
12.	Pengendalian internal membentuk pengendalian akuntansi dan pengendalian administrasi guna mendukung keamanan data sistem.					
13.	Keamanan data yang digunakan mencakup aspek <i>confidentially, integrity, availability, privacy, identification, authentication, authorization</i> dan <i>accountability</i> .					
14.	Keamanan data sistem menggunakan strategi <i>phsyscal security</i> (keamanan dari bencana seperti kebakaran, gempa, dll), <i>personal security</i> (keamanan personal), <i>operation security</i> (keamanan kemampuan organisasi), <i>communication security</i> (keamanan media komunikasi) dan <i>network security</i> (keamanan peralatan jaringan ataupun data organisasi).					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	SS	SS	SS	SS
		5	5	5	5	5
Prosedur						
15.	Data dikumpulkan mengikuti aturan SOP ( <i>Standard Operating Procedures</i> )					
16.	SOP setiap bidang kerja memberikan instruksi jelas dan memadai dalam proses pengumpulan data.					
17.	Data yang dikumpulkan memiliki informasi yang lengkap atau memadai untuk tahap selanjutnya yaitu pengelolaan data					
18.	Pengelolaan data mengikuti aturan SOP (Standard Operating Procedures)					
19.	Pengelolaan data dilakukan dengan cepat sehingga dapat tepat waktu dalam memberikan informasi.					
20.	Data yang disimpan menggunakan tingkat keamanan yang tinggi.					
21.	Data disimpan sesuai klasifikasi tertentu yang telah ditetapkan perusahaan dan sesuai SOP					
Data						
22.	Data yang digunakan bersifat objektif, valid dan relevan.					
23.	Data memenuhi kriteria yang terdapat dalam ketentuan data pada SOP					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
24.	Data dilengkapi informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan data.					
25.	Data sudah dimutakhirkan atau diperbaharui untuk kebutuhan pengguna dan tujuan informasi akuntansi					

**TABEL NILAI KRITIS DISTRIBUSI T**

df	One-Tailed Test						
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
	Two-Tailed Test						
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,002
1	1,000000	3,077684	6,313752	12,706205	31,820516	63,656741	318,308839
2	0,816497	1,885618	2,919986	4,302653	6,964557	9,924843	22,327125
3	0,764892	1,637744	2,353363	3,182446	4,540703	5,840909	10,214532
4	0,740697	1,533206	2,131847	2,776445	3,746947	4,604095	7,173182
5	0,726687	1,475884	2,015048	2,570582	3,364930	4,032143	5,893430
6	0,717558	1,439756	1,943180	2,446912	3,142668	3,707428	5,207626
7	0,711142	1,414924	1,894579	2,364624	2,997952	3,499483	4,785290
8	0,706387	1,396815	1,859548	2,306004	2,896459	3,355387	4,500791
9	0,702722	1,383029	1,833113	2,262157	2,821438	3,249836	4,296806
10	0,699812	1,372184	1,812461	2,228139	2,763769	3,169273	4,143700
11	0,697445	1,363430	1,795885	2,200985	2,718079	3,105807	4,024701
12	0,695483	1,356217	1,782288	2,178813	2,680998	3,054540	3,929633
13	0,693829	1,350171	1,770933	2,160369	2,650309	3,012276	3,851982
14	0,692417	1,345030	1,761310	2,144787	2,624494	2,976843	3,787390
15	0,691197	1,340606	1,753050	2,131450	2,602480	2,946713	3,732834
16	0,690132	1,336757	1,745884	2,119905	2,583487	2,920782	3,686155
17	0,689195	1,333379	1,739607	2,109816	2,566934	2,898231	3,645767
18	0,688364	1,330391	1,734064	2,100922	2,552380	2,878440	3,610485
19	0,687621	1,327728	1,729133	2,093024	2,539483	2,860935	3,579400
20	0,686954	1,325341	1,724718	2,085963	2,527977	2,845340	3,551808
21	0,686352	1,323188	1,720743	2,079614	2,517648	2,831360	3,527154
22	0,685805	1,321237	1,717144	2,073873	2,508325	2,818756	3,504992
23	0,685306	1,319460	1,713872	2,068658	2,499867	2,807336	3,484964
24	0,684850	1,317836	1,710882	2,063899	2,492159	2,796940	3,466777
25	0,684430	1,316345	1,708141	2,059539	2,485107	2,787436	3,450189
26	0,684043	1,314972	1,705618	2,055529	2,478630	2,778715	3,434997
27	0,683685	1,313703	1,703288	2,051831	2,472660	2,770683	3,421034
28	0,683353	1,312527	1,701131	2,048407	2,467140	2,763262	3,408155
29	0,683044	1,311434	1,699127	2,045230	2,462021	2,756386	3,396240
30	0,682756	1,310415	1,697261	2,042272	2,457262	2,749996	3,385185
31	0,682486	1,309464	1,695519	2,039513	2,452824	2,744042	3,374899
32	0,682234	1,308573	1,693889	2,036933	2,448678	2,738481	3,365306
33	0,681997	1,307737	1,692360	2,034515	2,444794	2,733277	3,356337
34	0,681774	1,306952	1,690924	2,032245	2,441150	2,728394	3,347934
35	0,681564	1,306212	1,689572	2,030108	2,437723	2,723806	3,340045
36	0,681366	1,305514	1,688298	2,028094	2,434494	2,719485	3,332624
37	0,681178	1,304854	1,687094	2,026192	2,431447	2,715409	3,325631
38	0,681001	1,304230	1,685954	2,024394	2,428568	2,711558	3,319030
39	0,680833	1,303639	1,684875	2,022691	2,425841	2,707913	3,312788
40	0,680673	1,303077	1,683851	2,021075	2,423257	2,704459	3,306878

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432





# NURUL GUSMIRANDA

## AKUNTANSI SYARIAH

### PROFIL

Nama saya Nurul Gusmiranda Raja Guk Guk, biasa dipanggil Nurul. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1995. Tinggi badan dan berat badan saya 158 cm dan 42 kg. Saya seorang pekerja keras, bisa beradaptasi dengan baik dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam bekerja.



JL. MESJID MEDAN ESTATE



NURULGUSMIRANDA@GMAILCOM



+6285 72918881



### KEAHLIAN KOMPUTER

#### PENDIDIKAN

ILMU KOMUNIKASI (S1)  
UIN Sumatera Utara  
2014 – 2019  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
SMAN 1 PERCUT SEI TUAN  
2011 – 2014

MICROSOFT WORD



POWER POINT



MYOB

PHOTOSHOP CS



WEBSITE



#### KELEBIHAN

KOMUNIKASI  
INISIATIF  
BERADAPTASI  
MANDIRI  
KERJASAMA TIM

### PENGALAMAN ORGANISASI

#### ANGGOTA

HMJ AKUNTANSI  
UIN SUMATERA UTARA  
Medan  
Agustus 2016 – November  
2017

#### VOLUNTEER/RELANAN

INDO RELAWAN  
Medan  
April-Juli 2019